

LAPORAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PELAIHARI
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah – Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.

Laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran Strategis dengan beberapa kendala, serta langkah perubahan kedepan.

Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian indicator kinerja utama (IKU) serta komponennya.

Capaian kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh pegawai yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta informasi dalam mewujudkan good governance dan clean governance

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas,



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19710224 199702 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	1
C. Sumber Daya Manusia	8
D. Isu Strategis	10
E. Produk dan Layanan	12
F. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Tujuan	14
B. Sasaran Strategis	14
C. Tabel (Tujuan, Indikator,Target,Sasaran,Indikator,Target 3 Tahun).....	15
D. Indikator Kinerja Utama	15
E. Perjanjian Kinerja	16
F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	23
1. Sasaran RPD	23
2. Eselon II	26
3. Eselon III Sekretaris.....	33
3.1 Eselon IV (Kasubag Perencanaan)	40
3.2 Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	43
3.3 Eselon IV (Kasubag Keuangan).....	47
4. Eselon III (Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan)	51
5. Eselon III (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)	75
6. Eselon III (Kabid Pengembangan Usaha Perikanan	135
7. Eselon III (Kabid Perikanan Tangkap)	140
B. Akuntabilitas Keuangan	146
BAB IV PENUTUP	151

A. Simpulan	151
B. Strategi Peningkatan Kinerja	152

LAMPIRAN

Lampiran 1	
Lampiran 2	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai laporan dari semua kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai target dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026, baik kegiatan administrasi yang bersifat rutinitas maupun kegiatan pembangunan sektor komoditi pangan dan perikanan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan kinerja dibuat dalam rangka wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka upaya pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang terukur secara periodik dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara bertahap dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra.

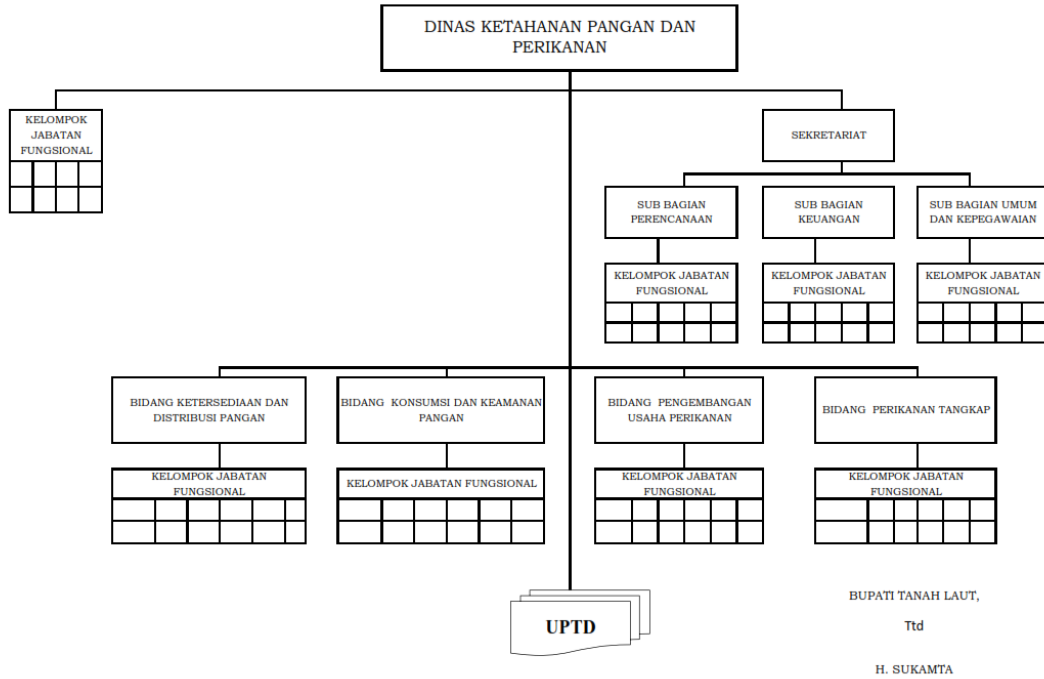
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 114 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021



Adapun Uraian Tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Uraian Tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;

6. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI);
7. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
8. Pengelolaan pembudidayaan ikan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
10. Pelaksanaan administrasi dinas;
11. Pembinaan UPT Dinas; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan

penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

- i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dari:

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan kepegawaian

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;

- b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- e. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

- 1. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Usaha Perikanan.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan usaha perikanan;
 - b. Perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha perikanan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengembangan usaha perikanan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha perikanan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
 - f. Pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - g. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Perikanan Tangkap

1. Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. Perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perikanan tangkap;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
 - e. Pelaksanaan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan;
 - g. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia

Dengan melaksanakan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh 27 personil dengan latar belakang beragam tingkat pendidikan.

Dalam menajalankan tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Kondisi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut hingga Desember 2024 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan formal

No	PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1.	S2	5	0	5	20 %
2.	S1	15	0	15	60%
3.	D-3	1	0	1	4%
4.	SLTA	4	0	4	16%
5.	SLTP	0	0	0	0%
6.	SD	0	0	0	0%
Jumlah		25	0	25	100%

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar bidang dengan tingkat pendidikan setingkat, pendidikan terdiri dari : SLTA sebesar 16%, D-3 sebesar 4%, S-1 sebesar 60%, S-2 sebesar 20%.

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	2	3	4	5	6
1	GOL I	0	0	0	0%
2	GOL II	2	0	2	8%
3	GOL III	16	0	16	64%
4	GOL IV	7	0	7	28%

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Tabel. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Jabatan/Eselonoring

No.	Eselon	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	3
4.	Non Eselon	16

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

D. Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

Permasalahan terkait dengan Ketahanan Pangan Belum optimalnya

- 1) Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan ,
- 2) Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
- 3) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
- 4) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya
- 5) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
- 6) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Permasalahan terkait Perikanan

a. Pengembangan Usaha Perikanan

- 1) Belum sepenuhnya petani pembudidaya menguasai dan menerapkan cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB)
- 2) Rendahnya kualitas/ mutu benih ikan
- 3) Menurunnya daya dukung lahan tambak
- 4) Saluran tambak mengalami pendangkalan
- 5) Adanya pencemaran air tambak
- 6) Hilangnya tambak akibat abrasi dan rob
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana budidaya perikanan
- 8) Tingginya harga pakan ikan tidak sebanding dengan kenaikan nilai produksi
- 9) Kapasitas SDM pembudidaya belum optimal
- 10) Kurangnya akses permodalan
- 11) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengolah dan pemasaran dalam hal inovasi

produk

- 12) Produk olahan perikanan di masyarakat masih rendah
- 13) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
- 14) Masih banyak pengolah hasil perikanan yang kurang higienis dan masih menggunakan bahan-bahan ADITIF (pengenyal, pengawet, pewarna)
- 15) Kurangnya akses pemasaran dan promosi produk hasil perikanan
- 16) Kurangnya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
- 17) Kurangnya permodalan dan Kurangnya kesadaran para pelaku usaha/ pengolah untuk memproses perijinan usaha pengolahan

b. Permasalahan terkait Perikanan Tangkap

- 1) Kurang optimalnya fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 2) Sedimentasi di alur pelayaran (pendangkalan muara sungai sehingga kapal kesulitan masuk TPI)
- 3) Masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan
- 4) Pemanfaatan dan penangkapan ikan di perairan umum belum optimal
- 5) Lemahnya pengawasan dan pengendalian aktifitas penangkapan ikan
- 6) Nelayan tidak mempunyai penghasilan lain di musim paceklik
- 7) Kurangnya sarana prasarana penangkapan.
- 8) Kurangnya informasi, pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan teknologi oleh Nelayan
- 9) Kurangnya akses permodalan

E. Produk dan Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Pemberian Rekomendasi Pembuatan Izin Kapal Perikanan dan Pengiriman Hasil Olahan
- b. Pemungutan Sewa Beli dan Sewa Pakai Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan
- c. Menyiapkan Persediaan Gabah untuk Penanggulangan Bencana

- d. Penyedia alat tangkap ramah lingkungan
- e. Penyedia bibit ikan dan pakan ikan sesuai standar
- f. Survei harga pangan di pasar
- g. Stabilitas harga pangan masyarakat

F. Sistematika Penyajian

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Renstra
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala DKPP)
 - 3. Eselon III Sekretaris
 - 3.1 Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 3.2 Eselon IV Kasubag Perencanaan

3.3 Eselon IV Kasubag Keuangan

4. Eselon III Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Eselon III Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
6. Eselon III Kabid Perikanan Tangkap
7. Eselon III Kabid Pengembangan Usaha Perikanan

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

- a. Simpulan
- b. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertanda tangan
3. Cascading/Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
5. Capaian Kinerja Renstra (2024-2026)
6. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 memiliki tujuan yang telah tertuang dalam Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024–2026 dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan merupakan landasan maupun pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak 2024–2026.

Dalam memenuhi tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mendasarkan pada Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026, yaitu:

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin diraih/ diwujudkan.

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian Pangan
2. Meningkatkan laju Pertumbuhan Sektor perikanan
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Tujuan Sebagai Berikut :

1. Indeks Ketahanan Pangan
2. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan
3. Nilai SAKIP KABUPATEN

b. Sasaran

Adapun Sasaran tersebut adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat
2. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
3. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DKPP Yang Akuntabel

Indikator Sasaran sebagai berikut

1. Skor PPH Konsumsi
2. Skor PPH Ketersediaan
3. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
4. Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan
5. Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target)

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Skor PPH Konsumsi	94	91	91,5	92
					Skor PPH Ketersediaan	93	72	72,5	73
2.	Meningkatkan laju Pertumbuhan Sektor perikanan	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	2,85	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
					Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP KABUPATEN	70,01	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DKPP Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	B	80,5	81,5	82

B. Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Jumlah ketersediaan energi dari kelompok pangan (kkal/kap/hari) dibagi total ketersediaan energi dari semua kelompok pangan (kkal/kap/hari) dikali skor ideal dari kelompok pangan (Skor PPH = $\sum(Ki/Kt \times Si)$)	Kepala Dinas, Bidang Ketersediaan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan	Kepala Dinas, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tahun } n - 1} \times 100$	Kepala Dinas, Bidang Perikanan tangkap, dan Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
		Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Olahan Perikanan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Olahan Perikanan Tahun } n - 1} \times 100$	Kepala Dinas, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
3	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DKPP Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<i>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</i>	Kepala Dinas

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

No	Eselon	Sasaran Strategis sesuai Renstra	Uraian Indikator	Target
1	II	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Skor PPH Konsumsi	91
			Skor PPH Ketersediaan	72
	II	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	2.5%
			Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan	1.5%
II	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DKPP Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80.5	
2	III	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	100%
	III	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	100%
	III	Meningkatnya Komsumsi Pangan/ Gizi	Angka Konsumsi Perkapita	90

	III	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100%
	III	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Tangkap	Persentase nelayan tangkap yang meningkat kapasitas produksinya	100%
	III	Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok pembudidaya yang meningkat kapasitas produksinya	100%
	III	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan nilai produk olahan perikanan	1.5 %
	III	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM DKPP	80
			Persentase perencanaan dan pelaporan	100%
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%
			persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	100%
3	IV	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	IV	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	IV	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	IV	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	IV	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

	IV	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	IV	Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.351.938.029	9.939.630.661
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12.864.746	12.864.746
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.379.099	8.041.879
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.485.647	4.822.867
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.059.952.247	5.159.952.247
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.049.952.252	5.149.952.252
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.999.995	9.999.995
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	440.007.750	620.007.750
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.007.750	20.007.750
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	420.000.000	600.000.000
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.273.446.596	1.471.919.228
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.856.986	14.856.986
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.987.641	443.228.709
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.948.847	8.948.847
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.824.747	13.456.311

	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000
	12	Penyediaan Bahan/Material	16,100,000	16,100,000
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.361.000	969.961.000
	14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.967.375	2.967.375
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.880.004.974	1.979.904.974
	15	Pengadaan Mebel	242.290.800	242.290.800
	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.637.714.174	1.737.614.174
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		524.921.716	510.621.716
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	70.700.000
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.921.716	439.921.716
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		160.740.000	184.360.000
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,000,000	38,000,000
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.760.000	126.380.000
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000	19.980.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		548.873.271	770.873.271
8	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		548.873.271	770.873.271
	22	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	221.821.405	443.821.405
	23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	36.746.000	36.746.000
	24	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	290.305.866	290.305.866

3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.229.891.933	1.414.187.612
9	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>		155.943.099	412.118.099
	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	127.402.339	386.322.339
	26	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	28.540.760	25.795.760
10	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>		782.471.266	663.056.200
	27	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	651.894.000	604.773.000
	28	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130.577.266	58.283.200
11	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>		291.477.568	339.0134.313
	29	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	20.720.600	20.720.600
	30	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	199.632.135	261.742.358
	31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	71.124.833	56.550.355
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		68,920,000	221.114.978
12	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		221.114.978	221.114.978
	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	221.114.978	221.114.978
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		174.123.665	174.123.665
13	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>		174.123.665	174.123.665
	33	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	97.008.676	97.008.676
	34	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	77.114.989	77.114.989

6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.057.161.288	1.384.701.288
14	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		640.725.317	640.725.317
	35	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	93.255.174	93.255.174
	36	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	547.470.143	547.470.143
15	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		416.435.971	743.975.971
	37	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	347.594.382	675.134.382
	38	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	44.522.803	44.522.803
	39	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	24.318.786	24.318.786
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		969.346.651	1.469.343.819
16	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>		239.726.550	239.726.550
	40	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	59.996.954	59.996.954
	41	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	179.729.596	179.729.596
17	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>		729.620.101	1.229.617.269
	42	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	704.625.101	1.204.622.269
	43	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	24.995.000	24.995.000
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		121.207.862	121.207.862
18	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>		121.207.862	121.207.862

	44	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	121.207.862	121.207.862
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		167.077.197	167.077.197
19	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>		167.077.197	167.077.197
	45	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	167.077.197	167.077.197
JUMLAH			13.840.734.874	15.662.260.353

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan/sub kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Yang mana akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan/sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

1. Tujuan dan Sasaran dalam RPD

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk peralihan atau pengisian pada waktu kekosongan kepemimpinan daerah, pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dengan tujuan daerah dan program strategis pembangunan daerah, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan harmoni

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Pangan;
2. Meningkatkan laju Pertumbuhan Sektor perikanan;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Gambaran Capaian Kinerja

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Permen/PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, fungsi organisasi tersebut. Adapun untuk memulai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian indikator kinerja utama diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi sejauhmana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator Kinerja Utama mencerminkan outcome dari program – program utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan memberikan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan perkembangan dinamika masyarakat, Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Indikator kinerja utama sesuai peraturan Perencanaan dan Reformasi Birokrasi merupakan acuan atau kerangka kerja Pemerintah Daerah Khususnya dalam pencapaian target kinerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024, yang benar-benar terukur yang harus dilaksanakan oleh SKPD sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Jumlah ketersediaan energi dari kelompok pangan (kkal/kap/hari) dibagi total ketersediaan energi dari semua kelompok pangan (kkal/kap/hari) dikali skor ideal dari kelompok pangan (Skor PPH = $\Sigma(Ki/Kt \times Si)$)	Kepala Dinas, Bidang Ketersediaan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan	Kepala Dinas, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tahun } n - 1} \times 100$	Kepala Dinas, Bidang Perikanan tangkap, dan Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
		Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Olahan Perikanan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Olahan Perikanan Tahun } n - 1} \times 100$	Kepala Dinas, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
3	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DKPP Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas

b. Kinerja (per indikator)

a) Perbandingan dengan realisasi target tahunan

No	Uraian Indikator	Satuan	2023		2024		Capaian (%)	Ket.
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persen	37.768 Ton (114%)	109.964	72,0	92,41	128%	
	Skor PPH Ketersediaan	Skor	37.768 Ton (114%)	109.964	72,0	92,41	128%	
	Skor PPH Konsumsi	Skor	91.2	89,7	90	88,6	95%	

2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	66.151	66.007	2,5	4,7	188%	
		Persen	1.423,14	1.465,21	2,5	4,7	188%	
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persen	2,5	2,5	2,5	4,7	188%	
	Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan	Persen	N/A	N/A	1,5	1,5	100%	
	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	75	38,60	80,5	80,6	100%	

Sasaran eselon II : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Indikator : Skor PPh Ketersediaan

Pencapaian indikator sesuai dengan tabel data pada tahun 2023 target pencapaian Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat terealisasi sebesar 109.964 Ton. Jika dilihat realisasi indikator pada tahun 2023 mengalami kenaikan pencapaian berbanding dengan realisasi tahun 2022 atau sebesar 19.2% dan dapat dikatakan tetap mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 114%. Adapun perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan capaian akhir pada renstra adalah tetap tecapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 114%.

Sedangkan pada tahun 2024 indikator mengalami perubahan menjadi skor pph ketersediaan dengan target skor sebesar 72,0 dan terealisasi sebesar 92,41.

Dalam sasaran strategis ini adapun kegiatan meliputi pengadaan Cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dan kebutuhan,

disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan / kerawanan pangan yang bersifat sementara ataupun keadaan darurat.

Saat ini Kabupaten Tanah Laut memiliki 1 (satu) buah Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang berada di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan pangan pemerintah yang merupakan sumber penyediaan pangan dalam menghadapi masalah pangan seperti kekurangan pangan / kerawanan pangan akibat bencana baik alam maupun non alam, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.

Untuk stok opname cadangan pangan pemerintah pada awal tahun 2024 adalah sejumlah 7000 kg gabah. Sedangkan pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun ini adalah sebanyak 40.175 kg beras dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II yang disimpan di Gudang Bulog, Landasan Ulin, Banjarbaru. Cadangan pangan pemerintah yang disalurkan pada tahun ini adalah sebesar 4.305 kg beras.

Pada akhir tahun 2024 sisa stok opname cadangan pangan pemerintah adalah sejumlah 30.500 kg beras. Diharapkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak bencana, baik bencana alam maupun non alam.

Sedangkan untuk lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2024 berjumlah 45 buah, dengan rincian 10 buah lumbung yang pembangunannya menggunakan dana APBD I dan 35 lumbung pembangunannya menggunakan dana DAK, APBD II dan Dana DID. Pembangunan lumbung Tahun 2024 dilaksanakan di Desa Kurau Kec. Kurau sebanyak 1 unit menggunakan dana APBD Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 untuk Gapotan Rindang Membangun. Akan tetapi terdapat 1 buah bangunan Lumbung Pangan Masyarakat dengan kondisi bangunan rusak berat, sehingga Lumbung Pangan Masyarakat per Desember 2024 berjumlah 44 buah.

Sasaran eselon II : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Indikator : Skor PPH Konsumsi

Pencapaian indikator sesuai dengan tabel data pada tahun 2023 target pencapaian Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat terealisasi sebesar 109.964 Ton. Jika dilihat realisasi indikator pada tahun 2023 mengalami kenaikan pencapaian berbanding dengan realisasi tahun 2022 atau sebesar 19.2% dan dapat dikatakan tetap mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 114%. Adapun perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan capaian akhir pada renstra adalah tetap tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 114%.

Sedangkan pada tahun 2024 indikator mengalami perubahan menjadi skor pph ketersediaan dengan target skor sebesar 90 dan terealisasi sebesar 88,6.

Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata berat bahan pangan kelompok padi-padian (beras, jagung, tepung terigu) dan umbi-umbian (singkong, ubi jalar, kentang, dan umbi-umbian lain) masing-masing 288,7 gram/kapita/hari (1144,3 Kalori/kapita/hari) dan 33,0 gram/kapita/hari (40 Kalori/kapita/hari), kontribusi energi berasal dari kelompok pangan sumber karbohidrat dari padi-padian dan umbi-umbian 55,0% melebihi target nasional 50% untuk hidup sehat.

Konsumsi energi penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebesar 2153 Kalori/kapita/hari (102,5% AKE), mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 2290 Kalori/kapita/hari (109% AKE) menurun 137 Kalori/kapita/hari. Konsumsi energi penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 Kalori/kapita/hari, dalam kategori Sesuai AKE/Normal.

Perkembangan konsumsi protein penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebesar 64,0 gram/kapita/hari (112,3% AKP, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (69,1 gram/kapita/hari) atau 121,3% AKP, telah memenuhi AKP 57 gram/kapita/hari (140,9% AKP) dalam kategori Lebih dari AKP.

Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dari segi kualitas, yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) terjadi peningkatan yang sangat tinggi dari 82,8 (Tahun 2021) dan 84,9 (Tahun 2022) menjadi 89,7 pada tahun 2023, tetapi menurun 88,6 (Tahun 2024) (dengan target Skor PPH Kabupaten sebesar 90) namun dari segi konsumsi energi telah melebihi target Nasional 2100

Kalori/kapita/hari. Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dan tepung terigu, sedangkan kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian masih rendah 33,0 Kalori/kapita/hari dari anjuran standar kecukupan 126 Kalori/kapita/hari. Kontribusi energi yang berasal dari konsumsi kelompok padi-padian (beras, jagung, dan terigu) 1144,3 Kalori/kapita/hari (58,7%) melebihi komposisi anjuran standar kecukupan konsumsi 1050 Kalori/kapita/hari (50%).

Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras tingkat rumah tangga adalah 0,113 artinya rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 tingkat rumah tangga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,12. Penurunan ini berarti masyarakat Kabupaten Tanah Laut mampu memanfaatkan sumber daya pangan lokal sebagai sumber karbohidrat dalam menggantikan beras dan tepung terigu. Situasi konsumsi pangan lokal non beras penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan lokal non beras, seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, dan umbi-umbian lain sebagai sumber karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dalam menu harian konsumsi penduduk sudah semakin tinggi.

Kebutuhan makanan penduduk Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa 54,2% dikeluarkan untuk kebutuhan makanan sedangkan 43,8%% dikeluarkan untuk kebutuhan non makanan. Dalam 3 tahun terakhir periode tahun 2022 – 2024, pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Tanah Laut cenderung lebih besar dibanding dengan pengeluaran non makanan (masih dibawah 60%), sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. berupa energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga akan meningkat, demikian juga halnya pada konsumsi protein.

Sasaran eselon II : Meningkatnya Produksi Perikanan.

Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Pada tahun 2023 target pencapaian Persentase Peningkatan Produksi Perikanan adalah 67.472,21 Ton.

Sedangkan pada tahun 2024 target pencapaian Persentase Peningkatan Produksi Perikanan adalah 69.612 Ton. Jika dilihat realisasi indikator pada tahun 2024 mengalami kenaikan pencapaian berbanding dengan realisasi tahun 2023.

b) Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (dengan capaian kab/kota lainnya)

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	160.237	220.726	133.196	92.025,5	109.964	N/A
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (ton)	59.974	61.225	64.545,1	65.031	66.007	67.026
	1.330	1.352	1.384,39	1.384,39	1.465,21	2.586

Indikator Kinerja	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)
Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	N/A
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	4,7

c) Analisis Peningkatan dan Penurunan kinerja

Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 41 orang terdiri dari 27 orang PNS dan 14 orang Non PNS.

Kendala – kendala dalam mencapai indikator tersebut adalah :

1. Faktor cuaca ekstrem yang melanda Kalimantan Selatan;
2. Belum optimalnya pengawasan illegal fishing;
3. Belum optimalnya peningkatan mutu dan kualitas produksi perikanan budidaya.

Rencana Aksi :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi terjadinya wabah hama;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan illegal fishing.

d) Upaya-upaya perbaikan kedepan

Jika melihat dari kendala – kendala yang ditemui dalam mencapai indikator diatas, maka dapat dilakukan upaya – upaya perbaikan ke depan untuk meminimalisir kendala yang telah ditemui, adapun upaya – upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Lebih intens dalam pendampingan penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah kebencanaan;
2. Lebih banyak melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam pengawasan illegal fishing;
3. Lebih intens dalam pemberian pendampingan dan audit CBIB untuk kegiatan pembesaran dan CPIB untuk kegiatan pembenihan;

4. Lebih intens dalam pemberian pendampingan terkait peningkatan mutu dan kualitas perikanan budidaya.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Jumlah anggaran untuk mendukung sasaran strategis pada tahun 2024 setelah ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 5,722,629,692,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,720,280,381,- atau jika dipersentasekan sebesar 82,48 %. Jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program – program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, yang terdiri atas 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan. Untuk efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
100	82,48	17,52

Jika dilihat pada tabel diatas terkait efisiensi penggunaan anggaran, maka dapat disimpulkan mengapa tidak melakukan refocusing anggaran dikarenakan hasil dari efisiensi anggaran didapat dari selisih antara pagu yang disediakan pada standar harga dan beberapa nilai HPS pada kontrak pengadaan, selain itu adanya beberapa perjalanan dinas yang tidak perlu dilakukan dikarenakan beberapa kelompok pembudidaya ataupun nelayan yang datang langsung berkonsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut dan ada yang berkoordinasi melalui penyuluh perikanan.

3. Eselon III (Sekretaris)

a. Analisis Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM DKPP	80	91,3	80	96.8
	Persentase perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%
	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota SKPD dengan beberapa kegiatan antara lain ;

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Kinerja
			Keuangan		
			Rp	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.939.630.661	8.060.428.641	81.09	95.36
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.864.746	11.071.502	86.06	100.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.041.879	6.826.000	84.88	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.822.867	4.245.502	88.03	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.952.247	4.698.153.533	91.05	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.149.952.252	4.689.309.933	91.06	100.00

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.999.995	8.843.600	88,44	100,00
		Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah	620.007.750	585.400.000	94,42	97,50
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.007.750	15.400.000	76,97	100,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	600.000.000	570.000.000	95,00	95,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.471.919.228	1.385.757.130	94,15	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.856.986	10.545.043	70,98	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.228.709	416.779.556	94,03	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.948.847	7.697.090	86,01	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.456.311	7.814.000	58,07	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00
		Penyediaan Bahan/Material	16.100.000	15.000.000	93,17	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969.961.000	922.925.441	95,15	100,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.967.375	2.596.000	87,48	100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.979.904.974	745.819.725	37,67	70,00
		Pengadaan Mebel	242.290.800	218.280.000	90,09	100,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.737.614.174	527.539.725	30,36	40,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.621.716	476.211.682	93,26	100,00

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.700.000	24,332,342	32.44	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.921.716	437.165.948	99,37	100.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.360.000	158.015.069	85.71	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	37.098.300	97,63	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.380.000	111.846.769	88,50	100.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000	9.070.000	45.40	100.00
		Rehab Gedung Kantor	0	0	0	0

Dari tabel diatas anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. **9.939.630.661,-** dengan realisasi sebesar Rp. **8.060.428.641,-** dengan persentase keuangan sebesar 81,09 % dengan realisasi kinerja 100 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu kenaikan nilai sakin dinas ketahanan pangan dan perikanan.

a. Sasaran Strategis IKM DKPP

pada tahun 2023 sasaran strategis IKM DKPP telah tercapai yaitu nilai 91,3 dengan target nilai 80, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **7,076,021,423,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6,053,142,743,-** dengan persentase keuangan sebesar 82,72 % dengan realisasi kinerja 100 %.

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis IKM DKPP telah tercapai yaitu nilai 96,8 dengan target nilai 80, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **9.939.630.661,-** dengan realisasi sebesar Rp. **8.060.428.641,-** dengan persentase keuangan sebesar 81,09 % dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Sasaran Strategis Persentase Perencanaan dan Pelaporan

pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pelaporan telah tercapai sesuai target yaitu 100% (7 Dokumen), untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **7,076,021,423,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6,053,142,743,-** dengan persentase keuangan sebesar 82,72 % dengan realisasi kinerja 100 %.

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis Persentase Perencanaan dan Pelaporan telah tercapai sesuai target yaitu 100% (8 Dokumen), untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **12.864.746,-** dengan realisasi sebesar Rp. **11.071.502,-** dengan persentase keuangan sebesar 86,06 % dengan realisasi kinerja 100 %.

c. Sasaran Strategis Persentase Administrasi Keuangan SKPD

Sedangkan pada tahun 2023 sasaran strategis Persentase Administrasi Keuangan SKPD telah tercapai sesuai target yaitu 100%, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **7,076,021,423,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6,053,142,743,-** dengan persentase keuangan sebesar 82,72 % dengan realisasi kinerja 100 %.

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis Persentase Administrasi Keuangan SKPD telah tercapai sesuai target yaitu 100%, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **5.159.952.247** dengan realisasi sebesar Rp. **4.698.153.533** dengan persentase keuangan sebesar 91,05 % dengan realisasi kinerja 100 %.

d. Sasaran Strategis Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian

Sedangkan pada tahun 2023 sasaran strategis Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian telah tercapai sesuai target yaitu 100%, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **7,076,021,423,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6,053,142,743,-** dengan persentase keuangan sebesar 82,72 % dengan realisasi kinerja 100 %.

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian telah tercapai sesuai target yaitu 100%, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan beberapa Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. **4.766.813.668,-** dengan realisasi sebesar Rp. **3.351.203.606,-** dengan persentase keuangan sebesar 81,04 % dengan realisasi kinerja 93,50 %.

b. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja tidak seluruh indikatornya mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 19 orang terdiri dari 10 orang PNS dan 9 orang Non PNS.

c. Analisa keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM DKPP	80	96.8	120,7%	Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan subbag yang menangani penyusunan IKM dan dalam pengawasan, serta pemberian pendampingan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan	
		Persentase perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan subbag yang menangani penyusunan perencanaan dan dalam pengawasan, serta pemberian pendampingan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan subbag yang menangani administrasi keuangan dan dalam pengawasan, serta pemberian	

						pendampingan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan	
		Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan subbag yang menangani administrasi administrasi umum dan kepegawaian dan dalam pengawasan, serta pemberian pendampingan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan	

Berdasarkan tabel diatas terkait analisis keberhasilan sasaran Sekeretaris Tahun 2024 disimpulkan seluruh sasaran strategis mengalami keberhasilan. Analisis sasaran (Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) mengalami keberhasilan dikarenakan Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan subbag yang menangani permasalahan sesuai dengan sasaran strategis diatas dan dalam pengawasan, serta pemberian pendampingan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisa efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja

Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja, rumusan perhitungan tingkat efesiensi ialah presentase capaian kinerja dibanding persentase anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=5/8
1	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.939.630.661	8.060.428.641	81,09	18,91 (Efisien)
TOTAL					9.939.630.661	8.060.428.641	81,09	18,91
Rata-rata penyerapan anggaran							81,09 %	

Berdasarkan Tabel diatas Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan menampilkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran rata - rata sebesar 81,09%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dan memiliki serapan anggaran sejumlah 81,09%, yang artinya kinerja Sekretaris “Sangat Baik” dan terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.879.202.020,- atau sebesar 18,91 %.

4.1 Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan)

Sasaran Strategis eselon IV : Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator : Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Analisis Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		2024	
		Target	Realiasi	Target	Realisasi
Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kinerja (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.864.746	100	11.071.502	86,06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.041.879	100	6.826.000	84,88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.822.867	100	4.245.502	88,03

Pada tahun 2023 sasaran strategis Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tercapai sesuai target yaitu 100% (7 Dokumen), untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.890.027,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.646.909,- dengan persentase keuangan sebesar 88.89% dan realisasi kinerja 100%.

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tercapai sesuai target yaitu 100% (8 Dokumen), untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.864.746,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.071.502,- dengan persentase keuangan sebesar 86.06% dan realisasi kinerja 100%.

b. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai pada Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural,

fungsional dan Non PNS berjumlah 3 orang terdiri dari 2 orang PNS dan 1 orang Non PNS.

c. Analisa keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan

Tingkat capaian indikator sasaran pada Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dianalisa menjadi sebuah keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Adanya pendampingan dari skpd koordinator yang membidangi perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah, serta keterlibatan bidang – bidang lingkup internal	

Berdasarkan tabel diatas terkait analisis keberhasilan sasaran Kepala Sub Bagian Perencanaan Tahun 2024 disimpulkan seluruh sasaran strategis mengalami keberhasilan. Analisis sasaran (Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) mengalami keberhasilan dikarenakan Adanya pendampingan dari skpd koordinator yang membidangi perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah, serta keterlibatan bidang – bidang lingkup internal.

d. Analisa efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja

Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja, rumusan perhitungan tingkat efesiensi ialah presentase capaian kinerja dibanding persentase anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=5/8
1	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	12.864.746	11.071.502	86,06	13,94 (Efisien)
TOTAL					12.864.746	11.071.502	86,06	13,94
Rata-rata penyerapan anggaran							86,06 %	

Berdasarkan Tabel diatas Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan menampilkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran rata - rata sebesar 86,06%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dan memiliki serapan anggaran sejumlah 86,06%, yang artinya kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan “Sangat Baik” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.793.244,- atau sebesar 13,94 %.

3.2 Eselon IV (Kassubag Umum Kepegawaian)

a. Analisa Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		2024	
		Target	Realiasi	Target	Realisasi
Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%

Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Tahun 2024, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kinerja (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95.36		81.09
Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.007.750	100	15.400.000	76,97
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	600.000.000	95	570.000.000	95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.471.919.228	100	1.385.757.130	94,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.856.986	100	10.545.043	70.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.228.709	100	416.779.556	94.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.948.847	100	7.697.090	86.01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.456.311	100	7.814.000	58.07

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	100	2,400,000	100.00
Penyediaan Bahan/Material	16.100.000	100	15.000.000	93.17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969.961.000	100	922.925.441	95.15
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.967.375	100	2.596.000	87,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.621.716	100	476.211.682	93,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.700.000	100	24,332,342	32.44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.921.716	100	437.165.948	99,37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.979.904.974	70	745.819.725	37,67
Pengadaan Mebel	242.290.800	100	218.280.000	90,09
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.737.614.174	100	527.539.725	30,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.360.000	100	158.015.069	85.71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	100	37.098.300	97,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.380.000	100	111.846.769	88,50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000	100	9.070.000	45.40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0

Untuk Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai (7) tujuh Sub Kegiatan, terdiri dari Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai pagu sebesar Rp. 14.856.986, realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 10.545.043 dengan persentasi sebesar 70,98%. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai pagu sebesar Rp. 443.228.709, realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 416.779.556 dengan persentasi sebesar 94,03%. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai pagu sebesar Rp. 8.948.847, realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 7.697.090 dengan persentase sebesar 86.01%. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu sebesar Rp. 13.456.311, realisasi

kinerja 100 % realisasi keuangan Rp. 7.814.000 dengan persentasi sebesar 58,06%. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pagu sebesar Rp. 2.400.000, realisasi kinerja 100% dengan persentase sebesar 100,00%. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material mempunyai pagu sebesar Rp 16.100.000 realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 15.000.000 dengan persentase sebesar 93.17%, pada Sub ini di anggarkan pada Pagu Anggaran Perubahan untuk Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai Pagu sebesar Rp. 969.961.000, realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 922.925.441 dengan persentasi sebesar 95,15%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai pagu sebesar Rp. 70.700.000 realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 24,332,342 dengan persentasi sebesar 32,44%, untuk Sub Kegiatan ini persentasinya kurang dari 50% disebabkan oleh Standar Harga Satuan Barang/SSH. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai pagu Anggaran Murni sebesar Rp. 439.921.716, realisasi kinerja 100% realisasi Keuangan Rp. 437.165.948 dengan persentasi sebesar 99,37%.

Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mempunyai pagu sebesar Rp. 38.000.000,00 realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 37.098.300 dengan persentasi sebesar 97,63%. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai pagu sebesar Rp. 126.380.000 realisasi kinerja 100% realisasi keuangan Rp. 111.846.769 dengan persentasi sebesar 88,50%. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai pagu sebesar Rp. 19.980.000 realisasi kinerja 100% realisasi Keuangan Rp. 9.070.000 dengan persentasi sebesar 45,40%. Untuk Sub Kegiatan ini terjadi capaian Keuangan hanya sebesar 58,73% disebabkan adanya penyesuaian dengan SSH.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan umum dan kepegawaian tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan dalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan pamarafan absen baik absen masuk dan pulang kantor serta mentaati apel baik apel gabungan hari Senin dan gabungan hari tertentu juga apel setiap hari di kantor.
- 3) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa meja kerja, kursi kerja untuk para auditor dan pejabat eselon IV dan Inspektur, laptop, komputer PC, lemari arsip, dan printer.
- 5) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor.
- 6) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

b. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai pada Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 9 orang terdiri dari 3 orang PNS dan 6 orang Non PNS.

3.3 Eselon IV (Kassubag Keuangan)

Sasaran Strategis eselon IV : Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Analisis Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		2024	
		Target	Realiasi	Target	Realisasi
Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kinerja (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.952.247	100	4.698.153.533	91,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.149.952.252	100	4.689.309.933	91,06
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.999.995	100	8.843.600	88,44

pada tahun 2023 sasaran strategis Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah tercapai sesuai target yaitu 100% (1 Dokumen), untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.308.206.663,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.382.431.004,- dengan persentase keuangan sebesar 82,56 % dengan realisasi kinerja 100%..

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah tercapai sesuai target yaitu 100% (5 Dokumen), untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.159.952.247,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.698.153.533,- dengan persentase keuangan sebesar 91,05 % dengan realisasi kinerja 100%.

b. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai pada Sub Bagian Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 3 orang terdiri dari 2 orang PNS dan 1 orang Non PNS.

c. Analisa keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan Kendala

Tingkat capaian indikator sasaran pada Kepala Sub Bagian Keuangan yang dianalisa menjadi sebuah keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Adanya arahan dan petunjuk dari Pimpinan, kerjasama dan koordinasi dari bidang-bidang serta pendampingan dari skpd koordinator yang	

						membawahi Sub Bagian Keuangan.	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas terkait analisis keberhasilan sasaran Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2024 disimpulkan seluruh sasaran strategis mengalami keberhasilan. Analisis sasaran (Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah) mengalami keberhasilan dikarenakan Adanya arahan dan petunjuk dari Pimpinan, kerjasama dan koordinasi dari bidang-bidang serta pendampingan dari skpd koordinator yang membawahi Sub Bagian Keuangan.

d. Analisa efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja

Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja, rumusan perhitungan tingkat efisiensi ialah presentase capaian kinerja dibanding persentase anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=5/8
1	Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.159.952.247	4.698.153.533	91,05	8,95 (Efisien)
TOTAL					5.159.952.247	4.698.153.533	91,05	8,95
Rata-rata penyerapan anggaran							91,05 %	

Berdasarkan Tabel diatas Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan menampilkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran rata - rata sebesar 91,05%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dan memiliki serapan anggaran sejumlah 91,05%, yang artinya kinerja

Kepala Sub Bagian Keuangan “Sangat Baik” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 461.798.714,- atau sebesar 8,95 %.

4. Eselon III (Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023				2024			
			TARGET	REALISASI	%	KET	TARGET	REALISASI	%	KET
Meningkatnya Ketersediaan Pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan pangan masyarakat	Ton	37.768 Ton (114%)	109.964	19,2	Kenaikan persentase surplus ketersediaan pangan tahun 2023 (berdasarkan ASEM)	N/A	N/A	N/A	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	%	N/A	N/A	N/A		100%	100%	100%	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	N/A	N/A	N/A		100%	100%	100%	

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk menjamin Ketersediaan Pangan dan Konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat Rumah Tangga, Daerah, Nasional untuk sepanjang waktu dan merata. Berdasarkan data Produksi pangan s.d tahun 2024 bahwa Tanah Laut berada pada posisi surplus pangan (beras) dengan target 114%. Dengan Jumlah penduduk 364.117 jiwa dengan kebutuhan pangan 37.493,9 ton/tahun sudah termasuk peningkatan kebutuhan pangan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Kondisi kebutuhan pangan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sangat tercukupi dengan nilai ketersediaan pangan yang cukup yaitu sebesar 125.068,5 ton bahkan surplus yang menjadi Cadangan Pangan Daerah sebesar 87.574,6 ton dan mengalami kenaikan nilai persentase surplus sebesar 13,7%.

Dimana Cadangan Pangan tersimpan dan terdistribusi di masyarakat dalam bentuk Stock / Distribusi Pasar lokal, Gudang Penggilingan Padi Masyarakat, 45

Lumbung Pangan Masyarakat dan stok cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog, Landasan Ulin, Banjarbaru.

Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat telah tercapai melebihi dari target yaitu 109.964 ton yang berada pada posisi surplus pangan (beras) dengan target 114%. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dengan pagu anggaran sebesar Rp 218.563.570,- realisasi keuangan sebesar Rp 212.572.120,- dengan persentase keuangan sebesar 97.26% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu sub kegiatan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis dengan pagu anggaran sebesar Rp 386.322.339,- realisasi keuangan sebesar Rp 102.825.000,- dengan persentase keuangan sebesar 26,62% dan realisasi kinerja sebesar 90% dan sub kegiatan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 2.495.000,- dengan persentase keuangan sebesar 87,54% dan realisasi kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu sub kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 81.655.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 81.375.000,- dengan persentase keuangan sebesar 99,66% dan realisasi kinerja sebesar 100% dan sub kegiatan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp

80.247.237,- realisasi keuangan sebesar Rp 31.467.665,- dengan persentase keuangan sebesar 39,21% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Untuk pagu anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 68.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 33.685.000,- dengan persentase keuangan sebesar 48,88% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2024 sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat juga tercapai melebihi dari target yaitu 125.068,5 ton yang berada pada posisi surplus pangan (beras) dengan target 114%. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 770.873.271,- dengan realisasi sebesar Rp 684.642.828,- dengan persentase keuangan sebesar 88,81% dan realisasi kinerja 100%.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan anggaran sebesar Rp 412.118.099,- dengan realisasi sebesar Rp 123.660.000,- dengan persentase keuangan sebesar 30,01% dan realisasi kinerja 100%. Serta kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 663.056.200,- dengan realisasi sebesar Rp 543.612.380,- dengan persentase keuangan sebesar 81,99% dan realisasi kinerja 100%.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 221.114.978,- dengan realisasi sebesar Rp 154.087.280,- dengan persentase keuangan sebesar 69,69% dan realisasi kinerja 100%.

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kinerja (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAAN PANGAN				
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	770.873.271	100	684.642.828	88,81
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	443.821.405	100	415.713.000	93,67
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	36.746.000	100	31.615.000	86,04
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	290.305.866	100	237.314.828	81,75
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	412.118.099	100	123.660.000	30,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	386.322.339	100	102.825.000	26,62
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	25.795.760	100	20.835.000	80,77
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	663.056.200	100	543.612.380	81,99
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	604.773.000	100	502.632.150	83,11
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	58.283.200	100	40.980.230	70,31
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	221.114.978	100	154.087.280	69,69
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	221.114.978	100	154.087.280	62

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan / kerawanan pangan yang bersifat sementara ataupun keadaan darurat.



Dokumentasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024 sisa stok opname cadangan pangan pemerintah adalah sejumlah 30.500 kg beras. Diharapkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak bencana, baik bencana alam maupun non alam.



Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024

Sedangkan untuk lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2024 berjumlah 45 buah, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Tani Makmur	Telaga	Pelaihari	
2	Mekar Sari I	Tajau Pecah	Batu Ampar	
3	Sari Mulia	Ujung	Bati-Bati	
4	Lestari Makmur	Sumber Makmur	Takisung	
5	Rezeky Tanjung	Tanjung Dewa	Panyipatan	
6	Unggul II	Karang Rejo	Jorong	
7	Mufakat	Panjaratan	Pelaihari	
8	Sarantang Saruntung	Kuringkit	Panyipatan	
9	Maju Bersama	Handil Birayang Bawah	Bumi Makmur	
10	Kayuh Baimbai	Handil Babirik	Bumi Makmur	
11	Tungkarang Bersatu	Tungkarang	Pelaihari	
12	Berkat Hemat	Raden	Kurau	
13	Rakat Mufakat	Handil Gayam	Bumi Makmur	
14	Harapan Baru	Guntung Besar	Pelaihari	
15	Maju Bersama	Handil Suruk	Bumi Makmur	
16	Beruntung Tani*	Handil Maluka	Bumi Makmur	
17	Makmur	Bumi Harapan	Bumi Makmur	
18	Al-Hidayah*	Handil Birayang Atas	Bumi Makmur	
19	Bunga Mekar	Sarikandi	Kurau	
20	Sekawan	Sungai Bakar	Bajuin	
21	Sumber Makmur	Bajuin	Bajuin	
22	Gapura	Maluka Baulin	Kurau	
23	Alung	Tambak Karya	Kurau	
24	Sidodadi	Benua Tengah	Takisung	
25	Lestari	Lokserapang	Pelaihari	
26	Berkat Permai	Angsau	Pelaihari	
27	Mitra Usaha	Pulau Sari	Tambang Ulang	
28	Usaha Mandiri	Batalang	Jorong	
29	Suka Maju	Tabanio	Takisung	
30	Jaka Suma	Telaga	Pelaihari	
31	Tunas Muda	Ambungan	Pelaihari	
32	Serumpun	Gunung Raja	Tambang Ulang	
33	Mekar Sari	Handil Labuan Amas	Bumi Makmur	
34	Suka Maju	Ketapang	Bajuin	
35	Berkat Rakat Mufakat	Padang	Bati-Bati	
36	Laras Banua	Banua Raya	Bati-Bati	
37	Gapoktan Sido Makmur	Damit	Batu Ampar	
38	Ruhui Rahayu	Bawah Layung	Kurau	
39	Berkat Mufakat	Kandangan Lama	Panyipatan	
40	Bestari	Padang Luas	Kurau	
41	Karya mandiri	Panggung	Pelaihari	
42	Maju Bersama	Sungai pinang	Tambang Ulang	
43	Karya Baru	Batakan	Panyipatan	

44	Rindang Membangun	Kurau	Kurau	
45	Karya Mulya	Kayu Abang	Tambang Ulang	Dihapuskan (Kondisi bangunan rusak berat)

Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2024 memiliki 45 buah Lumbung Pangan Masyarakat, dengan rincian 10 buah lumbung yang pembangunannya menggunakan dana APBD I dan 35 lumbung pembangunannya menggunakan dana DAK, APBD II dan Dana DID. Pembangunan lumbung Tahun 2024 dilaksanakan di Desa Kurau Kec. Kurau sebanyak 1 unit menggunakan dana APBD Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 untuk Gapotan Rindang Membangun. Akan tetapi terdapat 1 buah bangunan Lumbung Pangan Masyarakat dengan kondisi bangunan rusak berat, sehingga Lumbung Pangan Masyarakat per Desember 2024 berjumlah 44 buah.



Gambar Lumbung Pangan yang dibangun untuk Gapoktan Rindang Membangun Desa Kurau Kec. Kurau menggunakan Dana APBD TA.2024

Dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten / kota bukan hanya infrastruktur fisik saja tetapi ada pendukung kemandirian pangan berupa penyediaan infrastruktur Logistik, ditahun 2024 ini dilaksanakan pengisian gabah di Kelompok Tani Bestari Desa Padang Luas Kec. Kurau sebanyak 2 Ton Gabah. Kelompok ini mendapatkan bantuan pembangunan Lumbung Pangan pada Tahun 2023 lalu melalui Dana APBD Kab. Tanah Laut.



Desa Padang Luas, Kec. kurau
-3°37'46", 114°37'40", 68,0m, 6°
18/05/2024 10:41:35



Desa Padang Luas, Kec. kurau
-3°37'46", 114°37'40", 35,8m, 357°
18/05/2024 10:52:30

Pengisian Gabah di Poktan Bestari Desa padang Luas Kec. Kurau

Setelah dilaksanakannya pengisian gabah pada Triwulan ke 2 yang lalu serta pada bulan Agustus 2024 yang lalu juga mendapatkan bantuan penitipan gabah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Sebanyak 5,2 ton. Sehingga total gabah yang sudah berada di Poktan Bestari lebih dari 7 Ton, maka dilaksanakan rapat Koordinasi dan Evaluasi pengisian gabah pada kelompok Tani Bestari di Desa Padang Luas Kec. Kurau yang dihadiri oleh anggota dan pengurus kelompok, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Padang Luas Kec. Kurau. Diharapkan dengan adanya bantuan-bantuan pengisian dan penitipan gabah tersebut, anggota kelompok juga aktif menjalankan tabungan gabah yang dapat dijalankan untuk usaha ekonomi produktif, yakni simpan pinjam maupun tunda jual. kelompok dapat mengupayakannya untuk kegiatan produktif, dan masyarakat juga merasa aman pada saat kondisi rawan pangan karena memiliki cadangan pangan di dalam lumbung pangan.



**Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengisian Gabah di Kelompok Tani Bestari
Desa Padang Luas Kec. Kurau**

Selain pengisian gabah, dalam sub kegiatan penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian pangan juga dilaksanakan pengadaan Mesin Bed Dryer dan Mesin Rice Milling Unit untuk di hibahkan kepada kelompok tani. Bed Dryer untuk kelompok Tani Serumpun Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang dengan dana APBD Tahun 2024, dan Rice Milling Unit untuk dihibahkan kepada Kelompok Tani Suka Maju Desa Tabanio Kec. Takisung melalui dana APBD-P Tahun 2024.



Gambar Pengadaan Mesin Bed Dryer bagi Kelompok Tani Serumpun Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang



Dokumentasi Pengadaan Mesin RMU bagi Poktan Suka Maju Desa Tabanio Kec. Takisung

Selain hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut juga menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Kurau Kec. Kurau yang menerima pembangunan fisik lumbung pangan sebagai upaya untuk :

- Meningkatkan kesehatan, struktur, dan fungsi organisasi secara keseluruhan
- Meningkatkan tata kelola, kebijakan, prosedur, dan semua sistem internal organisasi
- Membantu mewujudkan program-program pembangunan yang efektif

- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan dan sumber daya di wilayah mereka
- Membentuk lembaga yang baik dan memberdayakan masyarakat

Pelatihan terdiri dari 3 (tiga) materi dengan susunan sebagai berikut :

1. Nama Narasumber : M.Radhi Anshari dari BULOG Kanwil Kalsel sebanyak 2 JPL dengan materi Manajemen Pengelolaan Lumbung Pangan dan Administrasi / Pembukuan Tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat



2. Nama Narasumber : Hendra dari Bank kalsel Cabang Pelaihari sebanyak 1,5 JPL dengan Materi Kredit Usaha Rakyat/ (KUR) Pertanian
3. Nama Narasumber : Listya Rini dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1,5 JPL dengan materi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BagiPelaku Usaha Pertanian



Dalam hal upaya untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan Kelompok Lumbung Pangan maupun kelompok afinitas binaan Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan juga

melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Kelompok Afinitas dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat dalam Kegiatan kajitiru Perberasan / Beras Organik Ke Kelompok Tani Tani Jaya II Desa Rawasari Kec. Sumber Jambe Kab. Jember Prov. Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh kelompok binaan DKPP Tala sebanyak 28 peserta terdiri dari perwakilan kelompok afinitas dan kelompok lumbung pangan masyarakat beserta pendamping Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang perberasan organik.

Kegiatan diawali dengan Kunjungan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kunjungan disambut langsung oleh Sekretaris DKPP Moch Sigit Boedi Ismoehartono beserta jajaran di Aula DKPP Kab. Jember.

Kepala Dinas DKPP Tala Achmad Taufik dalam sambutannya menyampaikan Kelompok Afinitas dan Kelompok Lumbung Pangan Tala ingin mengetahui dan belajar ke Desa Rowosari Kecamatan Sumber Jambe terkait pengembangan beras organik dan agrobisnisnya. Kunjungan ini ditutup dengan penyerahan cinderamata berupa kain sasirangan motif kijang khas Tala dari Kepala Dinas DKPP Tala Kepada Sekretaris DKPP Jember.



Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Kelompok Tani Tani Jaya II di Desa Rawasari Kec. Sumber Jambe Kab. Jember. Diketahui kelompok tani "Tani Jaya II" Desa

Rowosari Jember sudah dapat memproduksi beras organik hitam, merah dan coklat yang sudah mampu mengekspor sampai ke internasional salah satunya Jepang. Dalam interaksi ini, Kelompok Tani Jaya II melalui 3 orang perwakilannya untuk menjadi narasumber / membagikan ilmu terkait perberasan organik yang telah dikembangkan oleh kelompok ini. Adapun hal-hal yang dipelajari dalam kegiatan ini adalah :

1. Manajemen Budidaya Usaha Tani Padi Organik
2. Analisis Resiko dan Strategi Pengembangan Padi Organik
3. Teknik Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran Padi Organik



Diharapkan dengan berinteraksi langsung ini kelompok Afinitas dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat binaan DKPP Tala bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dapat belajar dari kelompok tani "Tani Jaya II" Desa Rowosari Jember terkait tata cara, pembinaan dan sampai sukses menjadi kelompok tani yang dikenal seperti sekarang sebagai percontohan.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and*

Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Indikator Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibanding kan dengan jumlah penduduk desa	• Pusdatin Kementan, 2019
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	- Potensi Desa 2023, BPS
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dibandingkan jumlah penduduk desa	- Data Terpadu Kesejahteraan sosial, Dinas Sosial 2023
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
	terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinkes, 2023

Tabel Indikator FSVA Kabupaten Tahun 2024

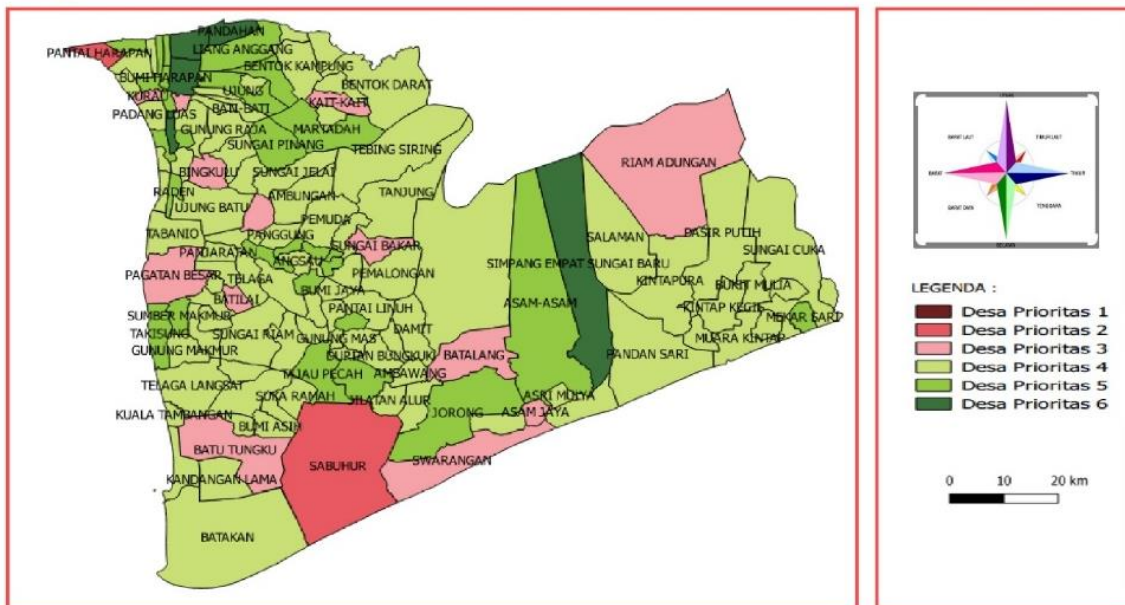
Pada tahun ini 2024, FSVA Kabupaten disusun dengan analisis sampai tingkat desa. FSVA Kabupaten ini menggunakan indikator yang berbeda dengan FSVA Nasional maupun FSVA Provinsi karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu karakteristik desa berbeda dengan karakteristik kabupaten dan kecamatan, serta ketersediaan data sampai tingkat desa.

Hasil analisis FSVA tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut terdapat 120 desa atau 88,89 % desa yang tahan pangan dan 15 desa atau 11.11 % dari 135 desa yang rentan terhadap kerawanan pangan. Dengan persentase tersebut merupakan suatu tantangan dan bagi Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang tahan terhadap kerentanan pangan.

Peta tersebut menunjukkan bahwa dari 135 desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk desa rentan pangan dengan rincian; 2 desa (1.48 %) desa berwarna merah sedang termasuk prioritas 2 (rentan sedang) dan 13 desa (9.63 %) desa berwarna merah muda prioritas 3 (rentan rendah) terhadap kerawanan pangan. Sedangkan 120 desa lainnya atau sebanyak 88.89 % yang berwarna hijau muda – hijau tua yaitu prioritas 4, 5 dan 6 termasuk desa yang relative tahan terhadap kerawanan pangan pada desa yang bersangkutan.



**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS / FSVA) TAHUN 2024**



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Tanah Laut Tahun 2024

Kecamatan yang mempunyai desa rentan pangan adalah Kecamatan Panyipatan (1 desa), Kecamatan Bumi Makmur (1 desa), Kecamatan Kurau (2 desa), Kecamatan Takisung (2 desa) Kecamatan Tambang Ulang (1 desa), Kecamatan Pelaihari (1 desa), Kecamatan Bajuin (2 desa), Kecamatan Jorong (4 desa) dan Kecamatan Kintap (1 desa).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 pada Tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat lagi di Kabupaten Tanah Laut. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh : (1) Rasio Luas baku Lahan Pertanian, (2) Rasio Penduduk tidak sejahtera (4) Rasio tanpa air bersih, dan (5) Rasio Tenaga Kesehatan.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio Luas Baku Lahan Pertanian (2) Sarana Penyedia pangan, (3) Rasio penduduk tidak sejahtera, (4) Rasio tanpa air bersih, (5). Rasio Tenaga Kesehatan.

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Indeks Komp	Peringkat	Komposit
1	BUMI MAKMUR	PANTAI HARAPAN	52.00	135	2
2	JORONG	SABUHUR	53.81	134	2
3	PANYIPATAN	BATU TUNGKU	55.86	129	3
4	TAKISUNG	BATILAI	58.46	122	3
5	TAKISUNG	PAGATAN BESAR	56.20	128	3
6	KURAU	KALI BESAR	55.76	130	3
7	KURAU	KURAU	58.21	124	3

8	BATI-BATI	KAIT-KAIT	54.85	132	3
9	TAMBANG ULANG	BINGKULU	57.42	125	3
10	PELAIHARI	PANGGUNG BARU	55.30	131	3
11	BAJUIN	SUNGAI BAKAR	56.97	126	3
12	JORONG	SWARANGAN	58.50	121	3
13	JORONG	ASAM JAYA	56.91	127	3
14	JORONG	BATALANG	58.39	123	3
15	KINTAP	RIAM ADUNGAN	54.05	133	3

**Daftar Sebaran Desa Rentan Terhadap Kerawanan Pangan Berdasarkan Skala Prioritas 2-3
Tahun 2024**

Keluarnya Desa Pantai Harapan dari Prioritas 1 (rentan rawan pangan tinggi) menjadi ke Prioritas 2 (rentan rawan pangan sedang) tidak lepas dari dukungan lintas sektor diantaranya dengan telah dibangunnya jalan penghubung / jembatan, sehingga akses menuju Desa Pantai Harapan sudah dapat dilewati kendaraan roda 4 dan dapat dilakukan setiap saat, tanpa terkendala air pasang.



Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Tanah Laut Tahun 2024 terdiri dari 5 SKPD terkait pengumpulan data, yakni :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Badan Pusat Statistik



Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

KECAMATAN	1	2	3
PANYIPATAN	0	0	1
TAKISUNG	0	0	2
KURAU	0	0	2
BUMI MAKMUR	0	1	0
BATI-BATI	0	0	1
TAMBANG ULANG	0	0	1
PELAIHARI	0	0	1
BAJUIN	0	0	1
BATU AMPAR	0	0	0
JORONG	0	1	3
KINTAP	0	0	1
JUMLAH	0	2	13
Persentase	0	1.48	9.63

Tabel jumlah desa di Kecamatan yang terindikasi rentan rawan pangan

Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Untuk tahun 2024 ini dilaksanakan pembinaan kelompok afinitas yang akan mendapatkan bantuan penguatan modal usaha bagi anggotanya, yakni di kelompok Tunas Mandiri Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan dan Kelompok Afinitas Sri Rejeki Desa Sabuhur Kec. Jorong. Kedua desa ini dipilih oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan bantuan, dikarenakan kedua desa ini juga ternasuk dalam kategori desa rentan rawan pangan berdasarkan hasil penyusunan Peta FSVA Tahun 2023 yang lalu.



Pembinaan Kelompok Wanita Tani Afinitas Sri Rejeki Desa Sabuhur Kec. Jorong



Pembinaan Kelompok Afinitas Tunas Mandiri Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan

Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Program kegiatan ini bersifat lintas sektor yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan stakeholder terkait. Wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, propinsi, dan kabupaten di pedesaan. Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah Food Security & Vulnerability Atlas (FSVA) dan desa rawan pangan, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30 % dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan pemecahan masalah serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu : (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian langsung.

Di tahun 2024 ini dilakukan pembinaan / pendampingan kepada kelompok afinitas yang mendapatkan bantuan dana hibah Penguatan modal Usaha dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok Tani Bestari Desa Padang Luas Kec. Kurau

sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta rupiah) dengan Rencana Usaha pengembangan ternak Sapi.

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan pemantauan, stok, pasokan dan harga pangan adalah melakukan pemantauan harga pangan eceran di pasar tradisional di Kabupaten dan untuk mengetahui informasi tentang faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang mempengaruhi distribusi dan harga pangan, seperti kondisi ketersediaan pasokan, permintaan, stok bahan pangan pokok strategis dan sebagainya.

Bahan pangan yang dipantau antara lain pangan pokok strategis, yaitu beras premium, beras lokal, bawang putih, bawang merah, cabe merah beras, cabe merah keriting, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, minyak goreng kemasan, tepung terigu, minyak goreng curah, ikan nila, ikan peda, dan ikan haruan.

Pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, konsumsi pangan cenderung meningkat, kondisi ini berpotensi untuk mendorong meningkatnya harga bahan pangan. Peningkatan harga pangan dipicu oleh perilaku dan harapan pelaku pasar untuk meningkatkan harga/pendapatannya, disamping hambatan dalam sistem distribusi dan pemasaran bahan pangan juga karena kenaikan harga bahan bakar minyak, masalah transportasi seperti sarana jalan dan alat angkutan.





Kegiatan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Kecamatan

Disamping kegiatan pemantauan, stok, pasokan dan harga pangan juga dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota yang merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan pangan dalam mendistribusikan, memasarkan, dan mengolah hasil panen. upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien.

Tujuan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota adalah membantu petani dalam menjaga stabilitas harga padi dan hasil panen lainnya, meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga, mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan mengembangkan kelembagaan distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi padi.

Adapun pendampingan Kegiatan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota yang dilakukan adalah pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok penggilingan padi serta sosialisasi pengembangan kelembagaan kelompok penggilingan padi.



Pembinaan dan Monitoring Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota di Kelompok Penggilingan Hamidan, Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang



Pembinaan dan Monitoring Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota di Kelompok Sumber Rejeki Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur



Sosialisasi Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan pada Kelompok Penggilingan Padi di Lok Serapang, Pelaihari

Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Pemecahan Masalah / Rencana Aksi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAAN PANGAN		
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	belum aktifnya kelompok dalam pengisian gabah di lumbung	Diaktifkannya lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan maupun sebagai salah satu usaha ekonomi produktif di desa dan dilakukan monev secara rutin pada Kelompok Lumbung Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kurang responnya pedagang pengecer dalam memberikan data informasi harga	Memberikan pemahaman kepada pedagang pengecer mengenai pentingnya kegiatan pemantauan harga pangan pokok
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jaringan distribusi kelompok penggilingan belum pernah bekerjasama dengan Perum Bulog	Melakukan kegiatan sosialisasi tentang jaringan distribusi pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Serangan hama burung dan hama tikus yang mengakibatkan tercecernya cadangan pangan pemerintah (gabah)	Untuk menanggulangi serangan hama burung adalah telah dipasangnya paranet sebagai penutup gabah sedangkan untuk menanggulangi serangan hama tikus adalah telah

		diletakkan palet dan karung berisi sekam sebagai alas untuk meletakkan karung gabah.
	Kelembaban udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas cadangan pangan pemerintah (gabah)	Untuk menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah (gabah) adalah dengan telah dibuatnya surat perjanjian penyegaran cadangan pangan pemerintah (gabah) serta dilakukan penjemuran cadangan pangan pemerintah (gabah) terlebih dahulu sebelum dilakukan penggilingan.
	Harga beras tidak sesuai dengan (lebih besar) dari harga standar satuan harga	Berkoordinasi dengan Perum Bulog Kanwil Kalsel dan Kasubbag Perencanaan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya kelompok dalam administrasi dan permodalan - Terkendalanya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (FSVA) dikarenakan terbatasnya data dari Dinas-dinas Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi untuk kelompok penerima hibah, serta Pembinaan Kelompok. Dalam setiap pembinaan diberikan pemahaman tentang tertib Administrasi dan perlunya jaringan usaha yang luas untuk kemudahan pemasaran hasil produksi - Rutin berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi serta menetapkan langkah lebih lanjut terkait Penyusunan Peta FSVA. - Mengajukan anggaran tambahan untuk penyusunan Laporan FSVA (Honor Tim FSVA).

a. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada tahun 2024 tercapai, dan persentase realisasi target kinerja indikator mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 4 (lima) orang PNS dan 3 (tiga) orang Non PNS.

b. Analisa keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan

Tingkat capaian indikator sasaran pada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang dianalisa menjadi sebuah keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan SKPD terkait data-data pendukung	
2	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan SKPD terkait data-data pendukung	

Berdasarkan tabel diatas terkait analisis keberhasilan sasaran Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Tahun 2024 disimpulkan bahwa sasaran strategis mengalami keberhasilan. Analisis sasaran (Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat) mengalami keberhasilan dikarenakan adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara intens dengan SKPD terkait mengenai data-data pendukung.

c. Analisa efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja

Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja, rumusan perhitungan tingkat efisiensi ialah presentase capaian kinerja dibanding presentase anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=5/8
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk							

	Kedaulatan dan Kemandirian Pangan								
	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	100%	100%	1.846.047.570	1.351.915.208	73,23%	26,77	(Efisien)
2	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan								
	Persentase penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	100%	100%	100%	221.114.978	154.087.280	69,69%	30,31	(Efisien)
TOTAL					2.067.162.548	1.506.002.488	72,85	27,15	
							Rata-rata penyerapan anggaran		72,85

Berdasarkan Tabel diatas Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menampilkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran rata - rata sebesar 72,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dan memiliki serapan anggaran sejumlah 72,85%, yang artinya kinerja Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan “Sangat Baik” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 561.160.060,- atau sebesar 27,15%.

5. Eselon III (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)

Capaian Kinerja Terhadap Target 2024 Skor PPH Konsumsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023				2024			
			TARGET	REALISASI	%	KET	TARGET	REALISASI	%	KET
Meningkatnya Konsumsi Pangan/ Gizi	Angka Konsumsi Perkapita	Nilai	91	89,7	98%		90	88,6	95%	

Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
---	---------------------------------------	---	------	------	------	--	------	------	------	--

A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Pola konsumsi pangan merupakan gambaran susunan jumlah dan jenis konsumsi pangan penduduk. Hasil analisis pola konsumsi pangan dijabarkan berdasarkan pangan yang paling banyak dan sering dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagai berikut:

(1) Pola Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat

Pangan yang bersumber dari karbohidrat berasal dari kelompok padi-padian dan umbi-umbian. Pada tahun 2024 diketahui bahwa rata-rata berat bahan pangan kelompok padi-padian yakni Beras sebesar 243,8 Gram/Kapita/Hari, Jagung sebesar 2,6 Gram/Kapita/Hari dan Terigu sebesar 42,2 Gram/Kapita/Hari, dan tahun 2023 diketahui bahwa rata-rata berat bahan pangan kelompok padi-padian yakni Beras sebesar 256,6 Gram/Kapita/Hari, Jagung sebesar 1,8 Gram/Kapita/Hari dan Terigu sebesar 50,4 Gram/Kapita/Hari. Selain itu sumber karbohidrat yang lain adalah dari umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, kentang, sagu dan umbi-umbian lain. Hasil data menunjukkan bahwa rata-rata berat pangan yang berasal umbi-umbian cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan antara tahun 2023 dan tahun 2024, kecuali singkong meningkat. Hal ini dapat terlihat pada data yaitu data tahun 2024 diketahui bahwa rata-rata berat bahan pangan singkong 26,0 Gram/Kapita/Hari, ubi jalar 5,9 Gram/Kapita/Hari, kentang 1,4 Gram/Kapita/Hari, dan umbi-umbian lain 1,6 Gram/Kapita/Hari, sedangkan tahun 2023 diketahui konsumsi rata-rata berat bahan pangan singkong 25,8 Gram/Kapita/Hari, ubi jalar 6,1 Gram/Kapita/Hari, kentang 3,1 Gram/Kapita/Hari, dan umbi-umbian lain 2,4 Gram/Kapita/Hari. Secara keseluruhan bahwa berat bahan pangan sumber umbi-umbian pada tahun 2023 sebesar 37,7 Gram/Kapita/Hari dan tahun 2024 sebesar 33,0 Gram/Kapita/Hari.

Pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut, hasil analisis data tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi energi berasal dari kelompok pangan

sumber karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) 55,0% dan tahun 2023 55,1%. Hal ini berarti pada tahun 2023 - 2024 tidak melebihi target nasional 56% untuk hidup sehat. Hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan 2024 juga menunjukkan bahwa penduduk mengonsumsi beras masing-masing sebesar sekitar 77,1 % dan 78,7%. Hal ini menunjukkan masyarakat masih sangat tergantung kepada beras sebagai bahan makanan pokok sumber karbohidrat. Jenis makanan berbahan tepung terigu merupakan bahan makanan kedua yang dikonsumsi oleh penduduk cukup banyak yakni (tahun 2023 sebesar 22,7% dan tahun 2024 sebesar 20,9%).

(2) Pola Konsumsi Pangan Sumber Protein

Pangan yang bersumber dari protein berasal dari kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan. Tahun 2024 diketahui rata-rata berat bahan pangan kelompok pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, dan ikan) dan kacang-kacangan (kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lain) masing-masing 160,3 gram/kapita/hari (371 Kalori/kapita/hari) dan 15,7 gram/kapita/hari (49 Kalori/kapita/hari), konsumsi yang sama pada tahun 2023 didapatkan hasil yakni 175 gram/kapita/hari (388 Kalori/kapita/hari) dan 15,7 gram/kapita/hari (51 Kalori/kapita/hari), Hal ini menunjukkan ada penurunan konsumsi kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan pada tahun 2024, dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi energi berasal dari kelompok pangan sumber protein, yaitu pangan hewani (tahun 2024 sebesar 17,2% dan tahun 2023 sebesar 17,0%) hal ini melebihi target nasional 12% dan kacang-kacangan ((tahun 2024 sebesar 2,3% dan tahun 2023 sebesar 2,2%) kurang dari target nasional 5% untuk hidup sehat.

(3) Pola Konsumsi Pangan Sumber Lemak

Pangan yang bersumber dari lemak berasal dari kelompok minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak lain-lain) serta buah/biji berminyak (kelapa, kemiri). Data tahun 2024 bahwa rata-rata berat bahan pangan kelompok minyak dan lemak serta buah/biji berminyak masing-masing 30,6 gram/kapita/hari (275,1 Kalori/kapita/hari) dan 2,0 gram/kapita/hari (11 Kalori/kapita/hari). Sedangkan pada tahun 2023 rata-rata berat bahan pangan kelompok minyak dan lemak serta buah/biji berminyak masing-masing 32,2 gram/kapita/hari (289,8 Kalori/kapita/hari) dan 2,6 gram/kapita/hari (14m3

Kalori/kapita/hari). Hal ini menunjukkan ada penurunan konsumsi kelompok kelompok minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak lain-lain) serta buah/biji berminyak (kelapa, kemiri) pada tahun 2024, dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kontribusi energi berasal dari kelompok pangan sumber lemak, yaitu minyak dan lemak 13,1% di atas target nasional 10% dan buah/biji berminyak 0,5% di bawah target nasional 3% untuk hidup sehat.

(4) Pola Konsumsi Pangan Sumber Vitamin dan Mineral

Pangan yang bersumber dari vitamin dan mineral berasal dari kelompok sayur dan buah. Rata-rata berat bahan pangan kelompok sayur dan buah tahun 2024 sebesar 235,1 gram/kapita/hari (109,5 Kalori/kapita/hari), sedangkan tahun 2023 rata-rata berat bahan pangan kelompok sayur dan buah sebesar 227,2 gram/kapita/hari (113,2 Kalori/kapita/hari). Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata berat bahan pangan kelompok sayur dan buah tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi energi berasal dari kelompok pangan sayur dan buah 5,1% masih di bawah target nasional 6% untuk hidup sehat.

Pola konsumsi pangan di Kabupaten Tanah Laut masih didominasi oleh tingginya konsumsi karbohidrat terutama beras sebagai pangan pokok sementara konsumsi kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan masih mengalami kekurangan jika dibandingkan dengan standar rekomendasi WNPG ke XI Tahun 2018. Sejalan dengan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian RI dalam Renstra 2020 – 2024 bahwa konsumsi pangan pokok beras per kapita di Asia Tenggara masih tinggi. Saat ini konsumsi beras di Indonesia 316 gram/kapita/hari, padahal cukup jika dipenuhi dengan 275 gram/kapita/hari. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian hanya 40 gram/kapita/hari, dari jumlah ideal 100 gram/kapita/hari. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan dalam pola konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya pendidikan, pengetahuan gizi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka perbaikan status gizi masyarakat sebagai salah satu prediktor untuk kualitas sumberdaya manusia. Situasi ini juga merupakan pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut – Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Kelompok/Jenis Pangan	Kabupaten Tanah Laut			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram Per Hari	Kilogram Per Tahun
1. Padi-Padian				
Beras	901.9	20.8	243.9	89.0
Jagung	2.9	0.1	2.6	0.9
Terigu	239.5	4.9	42.2	15.4
Subtotal Padi-padian	1,144.3	25.8	288.7	105.4
2. Umbi-umbian				
Singkong	31.7	0.2	26.0	9.5
Ubi Jalar	4.9	0.0	3.9	1.4
Kentang	0.7	0.0	1.4	0.5
Sagu	0.7	0.0	0.2	0.1
Umbi Lainnya	1.8	0.0	1.6	0.6
Subtotal Umbi-umbian	39.7	0.3	33.0	12.0
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	151.7	6.1	20.3	7.4
Daging Unggas	88.8	5.7	29.3	10.7
Telur	23.5	1.8	16.7	6.1
Susu	34.9	1.3	8.7	3.2
Ikan	72.1	13.2	85.3	31.2
Subtotal Pangan Hewani	370.9	28.1	160.3	58.5
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	-	-	-	-
Minyak Sawit	269.5	-	29.9	10.9
Minyak Lainnya	5.6	0.0	0.7	0.2
Subtotal Minyak dan Lemak	275.1	0.0	30.6	11.2

5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	8.5	0.1	1.6	0.6
Kemiri	2.5	0.1	0.4	0.1
Subtotal Buah/Biji Berminyak	11.0	0.2	2.0	0.7
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	47.1	4.1	15.0	5.5
Kacang Tanah	1.5	0.1	0.3	0.1
Kacang Hijau	0.6	0.0	0.3	0.1
Kacang lain	0.1	0.0	0.0	0.0
Subtotal Kacang-kacangan	49.2	4.3	15.7	5.7
7. Gula				
Gula Pasir	101.1	0.0	27.6	10.1
Gula Merah	3.7	0.0	1.0	0.4
Subtotal Gula	104.9	0.0	28.6	10.4
8. Sayur dan Buah				
Sayur	54.5	2.9	121.0	44.2
Buah	55.0	0.9	114.0	41.6
Subtotal Sayur dan Buah	109.5	3.8	235.1	85.8
9. Lain-lain				
Minuman	43.0	1.3	83.7	30.6
Bumbu	5.0	0.1	9.9	3.6
Subtotal Lain-lain	47.9	1.5	93.7	34.2

Tabel 4.1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Kelompok/Jenis Pangan	Kabupaten Tanah Laut			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi	Protein	Gram	Kilogram
	Kkal/Hari	Gram/Hari	Per Hari	Per Tahun
1. Padi-Padian				

Beras	939.1	21.7	256.5	93.6
Jagung	2.1	0.1	1.8	0.7
Terigu	276.6	6.0	50.4	18.4
Subtotal Padi-padian	1,217.8	27.8	308.7	112.7
2. Umbi-umbian				
Singkong	31.8	0.2	25.8	9.4
Ubi Jalar	7.8	0.1	6.1	2.2
Kentang	1.6	0.1	3.1	1.1
Sagu	0.0	0.0	0.0	0.0
Umbi Lainnya	2.7	0.0	2.4	0.9
Subtotal Umbi-umbian	43.9	0.4	37.3	13.6
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	152.2	6.3	21.0	7.7
Daging Unggas	93.1	6.0	30.7	11.2
Telur	24.1	1.9	16.9	6.2
Susu	31.4	1.1	8.1	3.0
Ikan	87.4	15.3	98.3	35.9
Subtotal Pangan Hewani	388.1	30.7	175.0	63.9
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	-	-	-	-
Minyak Sawit	286.7	-	31.8	11.6
Minyak Lainnya	3.1	0.0	0.4	0.1
Subtotal Minyak dan Lemak	289.8	0.0	32.2	11.7
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	11.0	0.1	2.1	0.8
Kemiri	3.3	0.1	0.5	0.2
Subtotal Buah/Biji Berminyak	14.3	0.2	2.6	0.9
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	46.9	4.1	14.5	5.3
Kacang Tanah	2.6	0.1	0.6	0.2

Kacang Hijau	1.0	0.1	0.5	0.2
Kacang lain	0.4	0.0	0.1	0.0
Subtotal Kacang-kacangan	50.8	4.4	15.7	5.7
7. Gula				
Gula Pasir	115.6	0.1	31.2	11.4
Gula Merah	3.9	0.0	1.0	0.4
Subtotal Gula	119.5	0.1	32.2	11.8
8. Sayur dan Buah				
Sayur	60.0	3.3	135.8	49.6
Buah	53.2	0.8	91.4	33.4
Subtotal Sayur dan Buah	113.2	4.1	227.2	82.9
9. Lain-lain				
Minuman	46.1	1.4	89.0	32.5
Bumbu	6.1	0.2	11.0	4.0
Subtotal Lain-lain	52.2	1.6	100.0	36.5

B. Konsumsi dan Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang 18 Tahun 2012). Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga dari aspek kualitas, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pemerintah

dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Saat ini, pola konsumsi yaitu tingkat kecukupan gizi energi, protein, dan skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja di bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang tercantum dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Tanah Laut – Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat provinsi, sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2012.

Penganeekaragaman konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, konsumsi makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Angka kecukupan energi dan zat gizi merupakan besarnya energi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Besarnya angka kecukupan energi dan zat gizi dipenuhi dari konsumsi setiap orang setiap hari. Kuantitas konsumsi pangan dapat diketahui dengan menghitung tingkat konsumsi energi. Setiap jenis bahan pangan dihitung kandungan energi dan zat gizi. Kandungan energi dari suatu jenis bahan pangan adalah berat pangan dalam satuan gram dikalikan dengan kandungan energi per gram pangan. Indikator kecukupan energi adalah proporsi konsumsi energi aktual terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut menggunakan acuan konsumsi energi 2100 Kalori/kap/hari (WNPG XI Tahun 2018). Selanjutnya, hasil analisis konsumsi dan tingkat konsumsi energi dan pola pangan harapan (PPH) penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Tabel 4.2. dan Tabe; 4.3.

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa konsumsi energi penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebesar 2290 Kalori/kapita/hari (109,0% AKE), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 2153 Kalori/kapita/hari (102,5% AKE) meningkat 137 Kalori/kapita/hari, dan konsumsi energi tersebut telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 Kalori/kapita/hari (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019). Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dari segi kualitas, yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 89,7 pada tahun 2023 menjadi 88,5 pada tahun 2024 (dengan AKE 2100 Kalori/kapita/hari). Hal ini berarti nilai skor PPH menunjukkan penurunan sekitar 1,2 point. Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dan terigu, sedangkan kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian pada tahun 2023 masih rendah yakni 44 Kalori/kapita/hari dari anjuran standar kecukupan 126 Kalori/kapita/hari. Kontribusi energi yang berasal dari konsumsi kelompok padi-padian (beras, jagung, dan terigu) 1218 Kalori/kapita/hari (53,2%) melebihi komposisi anjuran standar kecukupan 1050 Kalori/kapita/hari (50%).

Tabel 4.2. Konsumsi Energi (Kalori/Kapita/Hari), Tingkat Konsumsi Energi (%), dan Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Energi (Kkal/Kapita)	% Energi	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	308.7	1,218	53.2	58.0	0.5	26.6	29.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	37.3	44	1.9	2.1	0.5	1.0	1.0	2.5	1.0
3	Pangan Hewani	175.0	388	17.0	18.5	2.0	33.9	37.0	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	32.2	290	12.7	13.8	0.5	6.3	6.9	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	2.6	14	0.6	0.7	0.5	0.3	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	15.7	51	2.2	2.4	2.0	4.4	4.8	10.0	4.8
7	Gula	32.2	120	5.2	5.7	0.5	2.6	2.8	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	227.2	113	4.9	5.4	5.0	24.7	27.0	30.0	27.0

9	Lain-lain	100.0	52	2.3	2.5	-	-	-	-	-
	Total		2,290	100.0	109.0		99.9	108.9	100.0	89.7

Adapun kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian pada tahun 2024 masih rendah yakni 40 Kalori/kapita/hari dari anjuran standar kecukupan 126 Kalori/kapita/hari. Kontribusi energi yang berasal dari konsumsi kelompok padi-padian (beras, jagung, dan terigu) 1144 Kalori/kapita/hari (53,2%) melebihi komposisi anjuran standar kecukupan 1050 Kalori/kapita/hari (50%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sumber pangan umbi-umbian konsumsi pendudukan Kabupaten Tanah Laut masih rendah, perlu ditingkatkan lagi sebesar 86 Kalori/kapita/hari untuk mencapai target yang diharapkan, sedangkan untuk konsumsi pangan kelompok padi-padian sudah berlebih sehingga perlu upaya pembatasan dan pengurangan konsumsi sebesar 94 Kalori/kapita/hari untuk mencapai standar kecukupan yang dianjurkan.

Tabel 4.3. Konsumsi Energi (Kalori/Kapita/Hari), Tingkat Konsumsi Energi (%), dan Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Energi (Kkal/Kapita)	% Energi	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	288.7	1,144	53.2	54.5	0.5	26.6	27.2	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	33.0	40	1.8	1.9	0.5	0.9	0.9	2.5	0.9
3	Pangan Hewani	160.3	371	17.2	17.7	2.0	34.5	35.3	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	30.6	275	12.8	13.1	0.5	6.4	6.6	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	2.0	11	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	15.7	49	2.3	2.3	2.0	4.6	4.7	10.0	4.7
7	Gula	28.6	105	4.9	5.0	0.5	2.4	2.5	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	235.1	109	5.1	5.2	5.0	25.4	26.1	30.0	26.1
9	Lain-lain	93.7	48	2.2	2.3	-	-	-	-	-
	Total		2,153	100.0	102.5		101.0	103.6	100.0	88.5

Kondisi konsumsi secara kuantitas dan kualitas terjadi penurunan konsumsi energi serta skor PPH tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Penurunan kuantitas energi terjadi pada kelompok padi-padian 1217,8 Kalori/kapita/hari pada tahun 2023 menjadi 1144,3 Kalori/kapita/hari pada tahun 2024 (turun 75,5 Kalori/kapita/hari), kacang-kacangan (turun 71 Kalori/kapita/hari), Gula (turun 15 Kalori/kapita/hari), minyak & lemak (turun 15 Kalori/kapita/hari), serta sayur dan buah (turun 4 Kalori/kapita/hari). Sementara itu, secara prosentase energi kelompok pangan yang mengalami peningkatan, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan sayur dan buah.
- (2) Peningkatan dan penurunan kontribusi energi pada masing-masing kelompok pangan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 belum memenuhi diversifikasi konsumsi pangan atau belum berimbang, hal ini ditunjukkan dengan skor PPH belum mencapai 95 yakni 88,5, tetapi bila dibandingkan dengan target skor PPH sebesar 91,2 maka kinerja Kabupaten Tanah Laut untuk memenuhi diversifikasi konsumsi pangan telah mencapai 97,03%.
- (3) Kondisi konsumsi pangan secara kuantitas dan kualitas ini sangat berkaitan dengan peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial). Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai upaya melalui:
 - a. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan pemantauan status gizi;
 - b. Pemutakhiran Status Ketahanan dan Kerentanan Pangan setiap tahun;
 - c. Gerakan Edukasi Pola Konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) Suka Sayur dan Suka Buah sejak usia dini;
 - d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan (masyarakat dan anak sekolah);
 - e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah pangan dan gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
 - f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
 - g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat sesuai RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Tanah Laut;
 - h. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
 - i. Sosialisasi dan promosi gerakan Pengankeragaman Konsumsi Pangan B2SA Makan Ebak, Makan Sehat, dan Makan B2SA.

- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Evaluasi Konsumsi Pangan
- k. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

Berbagai upaya dalam pemenuhan konsumsi pangan penduduk secara kuantitas maupun kualitas, akan dapat menurunkan masalah *undernutritions* yaitu pendek (*stunting*), kurus (*wasting*), kekurangan zat gizi mikro, serta mengendalikan penyakit tidak menular (PTM). Disamping itu, analisis kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk secara kontinu dan berkelanjutan akan dapat digunakan dalam menetapkan target Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) 4,06% dan Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) 1,48% pada tahun 2024.

Dalam rangka mengatasi isu dan tantangan besar yang kita hadapi yakni ketidacukupan konsumsi pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Maka sebagai dasar perencanaan dan indikator kinerja daerah dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan. Ketidacukupan konsumsi pangan, atau yang sering disebut sebagai *Prevalence of Undernourishment (PoU)*, merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak masyarakat di Kalimantan Selatan. PoU mencerminkan persentase populasi yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pangan yang cukup bergizi untuk memenuhi kebutuhan dasar energi dan gizi.

PoU merupakan indikator penting yang mengukur jumlah penduduk yang tidak memperoleh asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka. Dan dijadikan sebagai **Ultimate Indikator**. Angka PoU untuk tahun 2023 Nasional tercatat sebesar 8,53%, masih di atas target RPJMN sebesar 5,2%. Namun, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 10,21%. Penurunan angka PoU ini merupakan refleksi dari perbaikan ekonomi pasca-pandemi dan penurunan angka kemiskinan dari 9,54% pada tahun 2022 menjadi 9,36% pada tahun 2023. Pada tahun 2019 angka PoU sebanyak 2,75, tahun 2020 sebanyak 2,50, tahun 2021 sebanyak 2,71 dan tahun 2022 sebanyak 3,61. Sedangkan di Kabupaten Tanah Laut angka PoU Tahun 2023 sebesar 4,06%

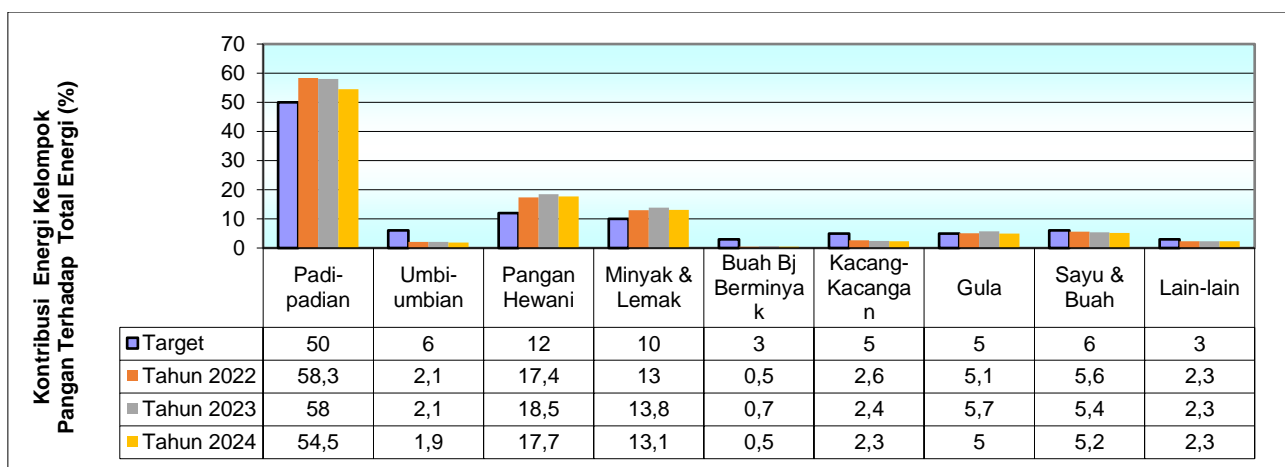
Konsumsi protein penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 69,1 gram/kapita/hari atau memenuhi 121,3%, telah melampaui standar anjuran angka kecukupan konsumsi protein (AKP) 57 gram/kapita/hari, sedangkan tahun 2024 sebesar 64,0 gram/kapita/hari atau memenuhi 112,3%, (turun 5,1 gram/kapita/hari). Namun angka ini telah melampaui standar anjuran angka kecukupan konsumsi protein (AKP) 57 gram/kapita/hari. Tingkat konsumsi protein 112,3% AKP ini dicerminkan dalam kualitas konsumsi pangan, dimana kontribusi energi dari kelompok pangan hewani 17,2% (371 Kalori/kapita/hari) dan kontribusi energi kacang-kacangan sebagai sumber protein 2,3% (49 Kalori/kapita/hari). Angka dari kontribusi kelompok pangan hewani telah melebihi standar anjuran yakni 17,2% (420 Kalori/kapita/hari) dari standar anjuran 12% (252 Kalori/kapita/hari), untuk kacang-kacangan 2,3% (49 Kalori/kapita/hari) masih kurang dari standar anjuran 5% (105 Kalori/kapita/hari) untuk kacang-kacangan. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 belum beranekaragam dan bergizi seimbang karena kontribusi energi berasal dari pangan sumber protein hewani melebihi standar sedangkan sumber nabati dari kacang-kacangan lebih rendah dari standar anjuran WNPG ke XI tahun 2018.

C. Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kabupaten Tanah Laut. Tingkat konsumsi pangan selain dinilai berdasarkan kuantitas kecukupan energi dan protein sesuai AKE dan AKP, penilaian berdasarkan kualitas atau keanekaragaman konsumsi pangan dianalisis dengan skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH). Konsumsi pangan yang mengarah pada pola komposisi pangan berbasis pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dapat terwujud apabila pemenuhan kebutuhan gizi seimbang didukung oleh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Kelompok pangan tersebut mencakup: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) aneka bumbu dan bahan minuman. PPH

merupakan bahan pedoman untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan yang digambarkan berdasarkan hasil nilai PPH dan komposisi pangan.

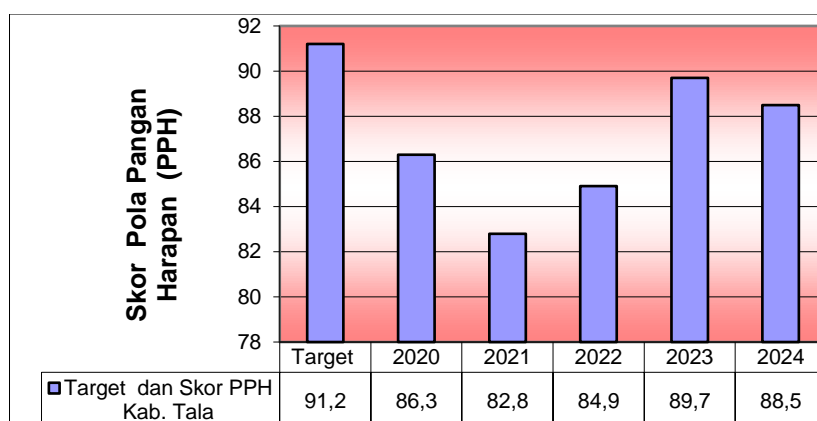
Hasil analisis skor mutu PPH yang disajikan pada Gambar 4.2. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2023 skor PPH 89,7 dari tahun 2022 dengan skor PPH 84,9 dan tahun 2021 82,8 (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Laut, 2024). Namun di tahun 2024 angka Skor PPH Kabupaten Tanah Laut sebesar 88,5 (turun 1,2 point). Skor PPH konsumsi pangan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 belum memenuhi skor PPH ideal target capaian skor PPH Konsumsi Nasional sebesar 95 pada tahun 2024 (memenuhi 93,2%). Bila dibandingkan dengan target Kabupaten Tahun 2024 sebesar 91,2 maka telah memenuhi 97,03%. Nilai skor mutu PPH menjadi salah satu indikator pembangunan pangan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 pada program prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan berdasarkan komposisi kelompok pangan sudah mulai membaik dalam 5 tahun terakhir periode tahun 2022–2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.3



Gambar 4.2. Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 – 2024, dan Standar Anjuran Konsumsi 2100 Kalori/Kapita/Hari

Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini selanjutnya akan mengarah pada pola komposisi pangan berbasis pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Suka Sayur, Suka Buah dan Suka Ikan. Implementasi pola konsumsi pangan B2SA dapat terwujud apabila pemenuhan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan Gizi Seimbang melalui Isi Piringku yang terdiri dari 1/3 Makanan Pokok (Padi-padian dan Ubi-umbian),

1/6 Lauk Pauk (Pangan Hewani dan Kacang-kacangan); 1/3 Sayuran, dan 1/6 Buah didukung oleh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat.



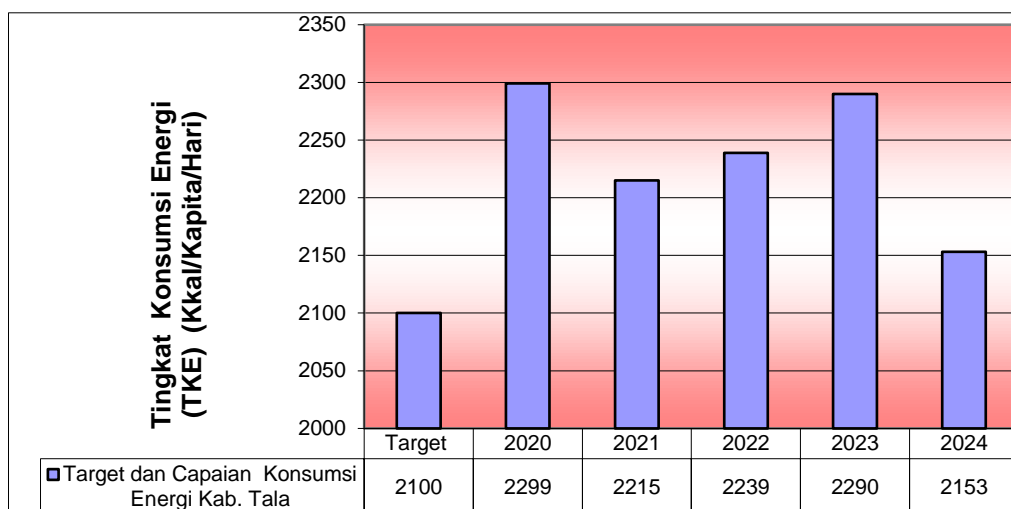
Gambar 4.3. Skor Mutu Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2024, dan Target Skor PPH Konsumsi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Gambar 4.3. menunjukkan bahwa situasi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut dalam 5 tahun terakhir 2020 – 2024 memiliki tren fluktuatif. Adanya perubahan situasi global akibat perubahan iklim, Pandemi Covid-19, situasi geopolitik dunia, dan disrupsi pasokan pangan menjadi pendorong adanya krisis pangan. Selanjutnya, hal ini akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, yang ditandai dengan penurunan konsumsi energi dan protein dari tahun 2020 ke 2020 hingga 2022, namun demikian pada tahun 2023 mulai meningkat tetapi menurun kembali pada tahun 2024. Hasil skor mutu PPH 2020-2024 ternyata masih memenuhi standar Nasional dan Kabupaten Tanah Laut yakni 95 dan 91,2. Namun dari segi kecukupan konsumsi energi dan protein telah dan bahkan melebihi standar rekomendasi WNPG ke XI Tahun 2018 masing-masing 2100 Kalori/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.4. dan Gambar 4.5.

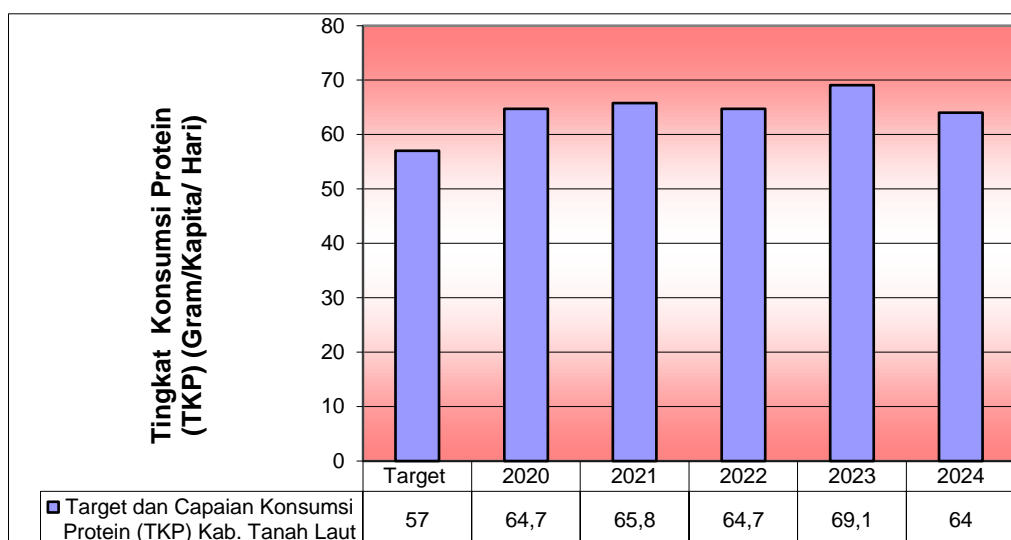
D. Proyeksi Komposisi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*), dalam tataran pembangunan pangan dan gizi dunia, menetapkan upaya penyediaan pangan, perbaikan gizi, dan perbaikan kualitas hidup ditempatkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan nomor satu. Konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* untuk memantapkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, arah pembangunan pangan

dan pertanian nasional dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 dimulai dari aspek *demand driven* (aspek pemanfaatan pangan) ke arah *supply driven* (penyediaan pangan).



Gambar 4.4. Target dan Capaian Konsumsi Energi Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2024, dan Target RPJMN 2020 - 2024 sesuai Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan



Gambar 4.5. Capaian dan Target Konsumsi Protein Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2024, dan Target RPJMN 2020 - 2024 sesuai Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan

Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator pembangunan pangan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 pada Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan target capaian skor PPH Konsumsi Nasional 95 dan target capaian skor PPH kinerja Kabupaten Tanah Laut 91,2 pada tahun 2024. PPH diukur agar dapat digunakan sebagai basis data untuk mengetahui angka kebutuhan pangan dalam perencanaan pembangunan pangan berdasarkan potensi dan kearifan lokal. Kualitas konsumsi pangan menjadi salah satu

indikator global dan nasional untuk menilai pemenuhan konsumsi pangan berdasarkan standar kecukupan gizi. Skor PPH yang ideal perlu dihitung dengan cermat agar kebijakan dalam mengambil langkah strategis juga tepat.

Skor PPH ideal 100 diharapkan dapat tercapai pada tahun 2027 sesuai dengan target yang ditetapkan Nasional. Proyeksi skor PPH pada setiap kelompok pangan maupun secara total perlu dilakukan setiap tahun. Proyeksi skor PPH Kabupaten Tanah Laut, apabila dilakukan peningkatan skor PPH rata-rata sebesar 1,4 poin setiap tahun, maka PPH ideal Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6. Skor PPH seluruh kelompok pangan harus ditingkatkan kecuali kacang-kacangan karena sudah sesuai skor PPH maksimal.

Tabel 4.6 Proyeksi/Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) – Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029

Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
	2025	2026	2027	2029	2029
Padi-padian	58,7	56,6	55,5	54,4	50,0
Umbi-umbian	1,3	2,5	3,1	3,7	6,0
Pangan Hewani	16,4	15,3	14,7	14,2	12,0
Minyak dan Lemak	7,4	8,0	8,4	8,7	10,0
Buah/Biji Brminyak	1,4	1,8	2,0	2,2	3,0
Kacang-kacangan	6,4	6,0	5,9	5,7	10,0
Gula	7,4	6,8	6,5	6,2	5,0
Sayur dan Buah	5,6	5,7	5,8	5,8	6,0
Aneka Bumbu dan Bahan Minuman	-	0,8	1,1	1,5	3,0
% AKG	104,6	103,5	102,9	102,3	100,0
Proyeksi ¹⁾					
Konsumsi Energi (Kalori/Kapita/Hari)	2197	2174	2161	2148	2100
Skor PPH (menggunakan AKE 2100 Kalori/Kapita/Hari)	94,7	95,9	97,3	98,6	100,0
Realisasi ²⁾					
Konsumsi Energi (Kalori/Kapita/Hari)	2197				
Skor PPH (menggunakan AKE 2100 Kalori/Kapita/Hari)	94,7				

Keterangan:

- 1) Proyeksi: berdasarkan Sasaran Skor PPH 95,2 pada Tahun 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024)
- 2) Realisasi: Survei Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa berdasarkan proyeksi capaian skor PPH ideal 100 pada tahun 2029, maka kelompok pangan yang harus ditingkatkan adalah umbi-umbian dalam rangka mewujudkan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, juga sayur dan buah yang merupakan sumber zat gizi mikro yang sangat bermanfaat bagi tubuh, karena kedua komponen gizi tersebut sangat penting dalam proses metabolisme tubuh sebagai zat pengatur dan antibodi juga bermanfaat menurunkan insiden terkena penyakit kronis.

Sayur dan buah merupakan makanan penting yang harus selalu dikonsumsi setiap kali makan. Konsumsi sayur dan buah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berfungsi sebagai zat pengatur, mengandung zat gizi seperti vitamin dan mineral, memiliki kadar air tinggi, sumber serat makanan, antioksidan dan dapat menyeimbangkan kadar asam basa tubuh. Berbagai manfaat tersebut dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit. Konsumsi sayur dan buah berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. mengendalikan tekanan darah, menurunkan risiko sulit buang air besar (BAB/sembelit) dan kegemukan.

Proyeksi kontribusi energi dari setiap kelompok pangan bertujuan mengetahui kelompok pangan yang harus ditingkatkan atau diturunkan serta besar kontribusi dalam pemenuhan AKG. Konsumsi dan tingkat konsumsi energi serta protein penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menunjukkan bahwa konsumsi energi sebesar 2153 Kalori/kapita/hari mengalami penurunan dibanding tahun 2023, yaitu 2290 Kalori/kapita/hari (menurun 137 Kalori/kapita/hari), angka tersebut telah memenuhi AKE 2100 Kalori/kapita/hari (104,6% AKE) dalam kategori Sesuai AKE/Normal, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. Demikian juga dengan perkembangan konsumsi protein tahun 2024 sebesar 64 gram/kapita/hari mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 (69,1 gram/kapita/hari), telah memenuhi AKP 57 gram/kapita/hari (112,3 % AKP) dalam kategori Lebih dari AKP (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014).

Tabel 4.7. Konsumsi dan Tingkat Konsumsi Energi serta Protein Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)

1	Padi-padian	1,218	53.2	58.0	27.8	40.1	48.7
2	Umbi-umbian	44	1.9	2.1	0.4	0.6	0.7
3	Pangan Hewani	388	17.0	18.5	30.7	44.4	53.8
4	Minyak dan Lemak	290	12.7	13.8	0.0	0.0	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	14	0.6	0.7	0.2	0.3	0.4
6	Kacang-kacangan	51	2.2	2.4	4.4	6.3	7.6
7	Gula	120	5.2	5.7	0.1	0.1	0.1
8	Sayur dan Buah	113	4.9	5.4	4.1	5.9	7.1
9	Lain-lain	52	2.3	2.5	1.6	2.3	2.8
	Total	2,290	100.0	109.0	69.1	100.0	121.3

Tabel 4.8. Konsumsi dan Tingkat Konsumsi Energi serta Protein Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,144	53.2	54.5	25.8	40.2	45.2
2	Umbi-umbian	40	1.8	1.9	0.3	0.5	0.6
3	Pangan Hewani	371	17.2	17.7	28.1	44.0	49.4
4	Minyak dan Lemak	275	12.8	13.1	0.0	0.0	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	11	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3
6	Kacang-kacangan	49	2.3	2.3	4.3	6.7	7.5
7	Gula	105	4.9	5.0	0.0	0.1	0.1
8	Sayur dan Buah	109	5.1	5.2	3.8	6.0	6.8
9	Lain-lain	48	2.2	2.3	1.5	2.3	2.6
	Total	2,153	100.0	102.5	64.0	100.0	112.3

Table 4.8. menunjukkan bahwa kontribusi energi kelompok pangan yang perlu diturunkan kurang lebih 4–6% hingga mencapai ideal adalah kelompok padi-padian (4,5%), dan pangan hewani (5,7%), sedangkan yang perlu ditingkatkan diantaranya yakni umbi-umbian (4,1%) kacang-kacangan (2,7%), dan sayuran dan buah (0,8) dan gula dipertahankan 5%. Sedangkan upaya peningkatan dan penurunan terhadap kontribusi

energi kelompok pangan yang perlu dilaksanakan hingga mencapai ideal agar mencapai target Skor PPH 100 pada tahun 2029.

E. Rasio Konsumsi Beras terhadap Konsumsi Non Beras Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras didefinisikan sebagai jumlah konsumsi energi pangan lokal yang dihitung dari konsumsi singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lain, dan jagung dibandingkan dengan konsumsi energi beras pada kurun waktu tertentu. Hasil analisis rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras dihitung dengan cara membagi jumlah konsumsi (dalam satuan kg) energi

pangan lokal yang dihitung dari konsumsi singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lain, dan jagung dengan konsumsi (dalam satuan kg) yang berasal dari beras. Konsumsi pangan kelompok padi-padian disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 49. Konsumsi Pangan Kelompok Padi-padian dan Umbi-umbian (Kg/Kapita/Tahun) Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Konsumsi Pangan Kelompok	Jumlah (Kg/Kapita/Tahun)
Padi-padian (Beras, Jagung, Tepung Terigu)	105,4
Umbi-umbian (Singkong, Ubi Jalar, Kentang, Sagu, dan Umbi Lain)	12

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras dihitung dengan cara membagi jumlah konsumsi energi pangan lokal yang dihitung dari konsumsi singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lain, dan jagung dengan konsumsi energi yang berasal dari beras, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras} = \frac{\text{Jumlah Konsumsi Energi Pangan Lokal}}{\text{Jumlah Konsumsi Energi dari Beras}}$$

$$\text{Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras} = \frac{12}{10,4}$$

$$\text{Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras} = 0,113$$

Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras tingkat rumah tangga adalah 0,113 artinya rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap konsumsi beras Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 tingkat rumah tangga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,12. Penurunan ini berarti masyarakat Kabupaten Tanah Laut mampu memanfaatkan sumber daya pangan lokal sebagai sumber karbohidrat dalam menggantikan beras dan tepung terigu. Situasi konsumsi pangan lokal non beras penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan lokal non beras, seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain sebagai sumber karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dalam menu harian konsumsi penduduk sudah semakin tinggi. Kondisi ini selanjutnya dapat membantu penurunan impor beras dan terigu sehingga diversifikasi atau penganekaragaman konsumsi pangan dapat segera terwujud.

Diversifikasi atau penganekaragaman pangan jika kembali pada definisi adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Penjabaran gizi seimbang adalah "Anjuran Susunan Makanan yang Sesuai Kebutuhan Gizi Individu atau Kelompok untuk Hidup Sehat, Cerdas, dan Produktif berdasarkan Pedoman Umum Gizi Seimbang" untuk dapat hidup sehat dan aktif, setiap hari individu harus mengonsumsi pangan sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber vitamin serta mineral dengan komposisi yang tepat sebagaimana disajikan pada Gambar 5.0.



Gambar 1. Pola Konsumsi Pangan Memenuhi Isi Piringku dengan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) Makan Enak, Makan Sehat dan Makan B2SA

Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dari segi kualitas, yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir dari 84,9 (Tahun 2022) dan 89,7 (Tahun 2023) menjadi 88,5 pada Tahun 2024 (dengan AKE 2100 Kalori/kapita/hari). Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dan tepung terigu, sedangkan kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian masih rendah 40 Kalori/kapita/hari dari anjuran standar kecukupan 126 Kalori/kapita/hari. Kontribusi energi yang berasal dari konsumsi kelompok padi-padian (beras, jagung, dan tepung terigu) 1144 Kalori/kapita/hari (53,2%) melebihi komposisi anjuran standar kecukupan 1050 Kalori/kapita/hari (50%).

F. Rasio Kontribusi Konsumsi Energi dari Pangan Lokal dibanding Konsumsi Energi dari Beras (%)

Rasio proporsional konsumsi energi dari pangan lokal dibanding konsumsi energi dari beras (%) merupakan hasil perbandingan konsumsi energi dari pangan lokal dibandingkan dengan konsumsi energi dari beras dalam satuan persen, dengan formula penghitungan sebagai berikut :

Rasio Persentase Proporsional

$$\text{Konsumsi Energi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Konsumsi Energi Pangan Lokal}}{\text{Jumlah Konsumsi Energi dari Beras}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Persentase Proporsional Konsumsi Energi (\%)} = \frac{33}{901,9} \times 100\% = 3,65\%$$

Hasil penghitungan rasio konsumsi energi menjelaskan bahwa persentase yang dihasilkan sudah baik. Menurut Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menjelaskan bahwa target rasio persentase konsumsi energi dari pangan lokal dibanding dari beras adalah 3,65% artinya apabila dibandingkan dengan angka di Kabupaten Tanah Laut maka capaian keberhasilan konsumsi yang mengutamakan sumber daya pangan lokal cukup baik meskipun belum memenuhi target Nasional 6%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai rasio persentase yakni 4,01% maka rasio persentase tahun 2024 cenderung mengalami penurunan.

G. Pengeluaran Pangan (Rp./Kapita/Bulan) Kabupaten Tanah Laut

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar, serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat (Rahmawati, 2012). Ketahanan pangan terdiri dari 3 subsistem, yaitu 1) Ketersediaan Pangan (*Food Availability*) 2) Akses Pangan (*Food Access*) 3) Penyerapan Pangan (*Food Utilization*) (Adriani dan Wirtjatmadi, 2012). Pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan pengeluaran rumah tangga, termasuk pola konsumsi pangan rumah tangga. Apabila pendapatan meningkat, pola konsumsi akan lebih beragam

sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi tinggi juga akan meningkat (Yudaningrum, 2011).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 melaporkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang tahun 2023 menunjukkan bahwa pengeluaran tidak hanya terdiri dari kelompok makanan tapi juga dari kelompok non makanan lain seperti perumahan, barang dan jasa, dan sebagainya. Lebih lanjut dilaporkan bahwa kebutuhan makanan penduduk Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa 54,20% dibelanjakan untuk kebutuhan makanan sedangkan 46,8%% dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan, sebagaimana disajikan pada Tabel

Tabel Data Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Konsumsi dan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-Rata Pengeluaran
		40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	40 Persen Teratas	
1	2	3	4	5	6
1	Padi-padian	88,883	103,446	117,690	100,480
2	Umbi-umbian	2,127	5,190	6,286	4,185
3	Ikan/UdangCumi/Kerang	53,699	81,469	124,476	78,997
4	Daging	17,223	30,616	51,374	29,427
5	Telur dan Susu	29,122	46,239	49,111	39,967
6	Sayur-sayuran	38,652	54,794	79,266	53,251
7	Kacang-kacangan	9,029	12,979	16,985	12,203
8	Buah-buahan	19,102	35,054	59,931	33,668
9	Minyak dan Kelapa	14,029	19,820	24,307	18,396
10	Bahan Minuman	20,137	29,190	35,842	26,976
11	Bumbu-bumbuan	12,155	16,820	23,144	16,224
12	Bahan Makanan Lainnya	10,554	15,172	17,201	13,732
13	Makanan dan Minuman Jadi	152,341	219,168	335,698	215,837

14	Rokok dan Tembakau	52,761	127,001	176,637	107,267
	Jumlah Makanan	519,975	796,958	1,117,948	750,609
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	198,305	352,478	651,356	350,827
16	Aneka Barang dan Jasa	66,178	110,675	237,255	118,297
17	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	20,059	35,726	70,105	36,367
18	Barang Tahan Lama	5,822	17,491	244,349	58,391
19	Pajak, Pungutan, dan Asuransi	31,682	48,774	97,534	51,729
20	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	NA	944	89,871	19,311
	Jumlah Bukan Makanan	324,259	566,088	1,390,470	634,922
	Rata-Rata Pengeluaran Kabupaten Tanah Laut	844,234	1,363,045	2,508,416	1,385,532

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 melaporkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang tahun 2023 menunjukkan bahwa pengeluaran tidak hanya terdiri dari kelompok makanan tapi juga dari kelompok non makanan lain seperti perumahan, barang dan jasa, dan sebagainya. Lebih lanjut dilaporkan bahwa kebutuhan makanan penduduk Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa 53,8% dibelanjakan untuk kebutuhan makanan sedangkan 46,2%% dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan, sebagaimana disajikan pada Tabel

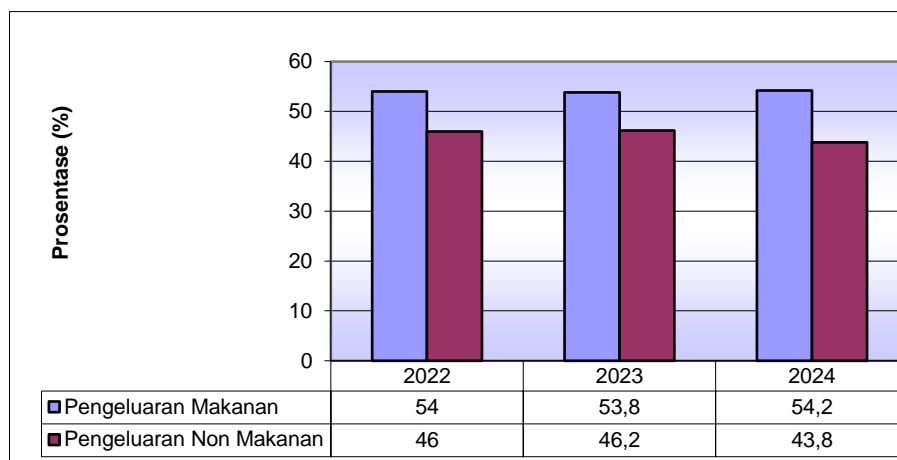
Tabel Data Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Konsumsi dan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total
		40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	40 Persen Teratas	Rata-Rata Pengeluaran
1	2	3	4	5	6
1	Padi-padian	87,161	100,176	121,589	99,254
2	Umbi-umbian	4,125	6,241	8,213	5,789

3	Ikan/UdangCumi/Kerang	63,683	96,723	132,879	90,739
4	Daging	17,745	31,063	55,344	30,593
5	Telur dan Susu	29,215	40,066	55,531	38,819
6	Sayur-sayuran	42,475	59,016	74,328	55,452
7	Kacang-kacangan	9,146	11,932	16,374	11,707
8	Buah-buahan	14,568	31,210	67,852	31,884
9	Minyak dan Kelapa	17,234	21,668	29,320	21,425
10	Bahan Minuman	20,578	28,224	36,115	26,744
11	Bumbu-bumbuan	12,250	18,411	22,585	16,781
12	Bahan Makanan Lainnya	12,901	15,134	21,267	15,468
13	Makanan dan Minuman Jadi	167,532	252,319	405,652	249,078
14	Rokok dan Tembakau	63,547	103,461	156,501	98,106
	Jumlah Makanan	562,161	815,642	1,203,550	791,848
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	204,197	358,132	648,457	354,648
16	Aneka Barang dan Jasa	72,449	120,401	223,726	121,891
17	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	20,309	38,167	70,719	37,536
18	Barang Tahan Lama	14,345	23,687	289,743	73,184
19	Pajak, Pungutan, dan Asuransi	34,523	56,496	103,403	57,091
20	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	1,696	8,802	150,716	34,354
	Jumlah Bukan Makanan	347,518	605,686	1,486,765	678,694
	Rata-Rata Pengeluaran Kabupaten Tanah Laut	909,679	1,421,328	2,690,315	1,470,542

Tabel dan Tabel menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2023 – 2024, pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Tanah Laut cenderung lebih besar dibanding dengan pengeluaran non makanan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan

gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Pemenuhan gizi yang diperoleh dari pangan yang dikonsumsi akan menentukan tingkat konsumsi. Semakin tinggi nilai gizi pangan berupa energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga akan meningkat, demikian juga halnya pada konsumsi protein. Sebagaimana disajikan pada Gambar 4.4. (Capaian dan Target Konsumsi Energi Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 – 2023), tetapi turun tahun 2024 dan hasil data juga menunjukkan bahwa konsumsi energi dan protein pada tahun 2021 dan 2024 memenuhi standar kecukupan konsumsi rekomendasi WNPG ke XI Tahun 2018 masing-masing 2100 Kalori/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari.



Grafik Data Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Konsumsi dan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022-2024

Ernest Engel (1857 dalam BPS, 2014) menyatakan bahwa persentase pengeluaran untuk makan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator untuk kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Teori konsumsi Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini (pendapatan *disposable*) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan demikian, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya (Pujoharso, 2013). Perbedaan tingkat pendapatan

akan mengakibatkan perbedaan pola distribusi pendapatan termasuk pola konsumsi rumah tangga. Dalam kondisi terbatas (pendapatan kecil), maka rumah tangga akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan dan sebagian besar pendapatan tersebut dibelanjakan untuk konsumsi makanan, sehingga semakin rendah pangsa pengeluaran makanan, berarti tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik (Ariani et al., 2007).

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam 3 tahun terakhir (tahun 2022– 2024) menunjukkan semakin baik, karena pangsa pengeluaran makanan yang lebih tinggi (tapi masih kurang dari 60% batas anjuran standar) terhadap pengeluaran non makanan), sebagaimana disajikan pada Grafik. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebesar Rp 1.357.516,- yang terdiri dari Rp 733.467,- pengeluaran makanan dan Rp 624.049,- pengeluaran non makanan per kapita per bulan Tahun 2023 rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp 1.470.542,- yang terdiri dari Rp 791.848,- pengeluaran makanan dan Rp 678.695,- pengeluaran non makanan per kapita per bulan, sedangkan pada Tahun 2024 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp 1.385.532,- yang terdiri dari Rp 750.609,- pengeluaran makanan dan Rp 634.922,- pengeluaran non makanan per kapita per bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 cenderung menurun dibandingkan tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Grafik diatas.

H. Rekomendasi Perbaikan Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut – Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara kontinu dan berkelanjutan melaksanakan sosialisasi Gerakan Pangan Non Beras Non Terigu, yang di gelar di semua Kecamatan pada masing-masing desa tertentu di Kecamatan. Program sosialisasi ini merupakan kegiatan gerakan pangan non beras non terigu, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) kepada masyarakat khususnya siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah serta para guru dan kepala sekolah, PKK / Aparat Desa, Kelompok Wanita Tani (KWT). Sosialisasi ini sangat penting, bahwa pangan itu bukan hanya beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat, tapi terdapat jenis pangan lain seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun,

sorghum, serta umbi-umbian lain. Gerakan sosialisasi konsumsi pangan lokal non beras kepada PKK / Aparat Desa, Kelompok Wanita Tani (KWT), para siswa SD/MI kelompok usia anak-anak, sehingga saat dewasa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan non beras dan non tepung terigu.

Program kegiatan gerakan pangan non beras non terigu, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku masyarakat agar beralih mengonsumsi pangan ke bahan pangan non beras dan non terigu. Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain para pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut diharapkan turut mendukung gerakan tersebut dengan menciptakan kreasi masakan berbahan non beras dan terigu, seperti dari talas, singkong dan jagung, sehingga nantinya akan muncul kuliner dari bahan jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain.

Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui: 1) Peningkatan aktivitas fisik; 2) Peningkatan perilaku hidup sehat; 3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 4) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 5) Peningkatan kualitas lingkungan; dan 6) Peningkatan edukasi hidup sehat.

Program perbaikan konsumsi pangan harus diawali sejak aspek hulu yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan, hingga hilir yaitu konsumsi pangan. Upaya perbaikan konsumsi pangan harus dilakukan bersama-sama oleh SKPD terkait bersama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat maupun media dengan peran masing-masing. Bappeda berperan sebagai pengawal program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD/Renja masing-masing SKPD sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan sebagai *focal point* yaitu SKPD kunci.

Program/kegiatan yang dapat dilakukan lintas sektor Pemerintah maupun *Stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2029 dengan memperhatikan kondisi capaian aktual tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, antara lain melalui:
 - a. Edukasi pola konsumsi pangan B2SA pada setiap keluarga sejak usia dini.
 - b. Meningkatkan konsumsi protein hewani, protein nabati, sayuran dan buahbuahan untuk mengatasi masalah gizi mikro.
 - c. Mengurangi konsumsi beras sesuai porsi ideal.
 - d. Mengembangkan industri pangan olahan berbahan baku lokal sebagai upaya substitusi tepung terigu
 - e. Menyediakan pendampingan untuk keberlanjutan UMKM yang mengolah pangan local yang baik dan aman.
 - f. Memberdayakan rumah tangga untuk penyediaan pangan yang beragam (sayuran, protein hewani, protein nabati) melalui pemanfaatan pekarangan dan media lainnya.
 - g. Membangun sistem pengendalian *food waste*.
 - h. Mengutamakan pemberian ASI eksklusif dan pemberian MPASI tepat waktu berbasis pangan local.
 - i. Menyediakan makanan tambahan bergizi untuk anak stunting maupun anak sekolah di lokasi rentan rawan pangan.
 - j. Mendorong peningkatan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi.
 - k. Mendorong peningkatan jumlah dan pengetahuan tenaga dan layanan kesehatan (Posyandu) secara merata untuk seluruh masyarakat.
 - l. Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun, melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan/*stakeholders* (pemerintah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani).

I. PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Penganekaragaman Pangan adalah upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumberdaya lokal untuk (a) memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (b) mengembangkan usaha Pangan, (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, serta pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan melalui pola konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga.

Kualitas konsumsi yang belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang B2SA secara tidak langsung dapat menyebabkan stunting. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%, dengan target penurunan sampai dengan 14% pada tahun 2024. Begitu juga dengan angka POU yang masing relatif tinggi tahun 2022 sebesar 10,2% (target RPJMN 5% tahun 2024), serta daerah rentan rawan pangan tercatat 74 Kabupaten/kota masih rentan rawan pangan.

Untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan secara masif peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pola konsumsi pangan B2SA dalam membangun generasi penerus yang sehat, aktif, dan produktif. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, promosi, dan edukasi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Selain itu dapat dilakukan pemberdayaan ibu rumah tangga/wanita dalam penyiapan pangan B2SA untuk keluarganya yang dikelola oleh kader PKK.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mendukung upaya penanggulangan masalah gizi di Kabupaten Tanah Laut melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa B2SA yang dilaksanakan di Desa Raden Kecamatan Kurau. Kegiatan Pengembangan Desa B2SA merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam satu desa/wilayah yang setara, terdiri dari teras B2SA, gerai pangan B2SA dan Rumah Pangan B2SA. Kegiatan Pengembangan Desa B2SA diharapkan dapat menyediakan bahan pangan, memudahkan akses pangan, mengolah menu makanan B2SA dan memanfaatkan hasil olahan menu

makanan B2SA dengan memanfaatkan pangan sesuai kearifan lokal yang selanjutnya diberikan kepada sasaran program pencegahan stunting (calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0-24 bulan), anak gizi buruk dan gizi kurang yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai kader dalam mensosialisasikan konsumsi pangan B2SA. Keberlanjutan dari kegiatan ini dapat dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Provinsi, yang nanti diharapkan dapat pelaksanaannya dilanjutkan melalui APBD Kabupaten, pemerintah desa atau sumber pendanaan lainnya.

Komponen kegiatan pengembangan desa B2SA, terdiri dari 3 komponen yaitu:

a. Teras Pangan B2SA

Teras pangan B2SA merupakan salah satu kegiatan yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk penyediaan pangan B2SA di lahan sekitar rumah dan/atau di lahan tertentu seperti lahan milik desa, lahan di sekolah, lahan di rumah ibadah, dan lain-lain.

Fasilitasi yang diberikan berupa pengadaan leaflet/brosur promosi, plang nama teras pangan B2SA, sarana produksi seperti polybag, pupuk, benih, bibit, media tanam dan sarana penunjang lainnya.

b. Gerai Pangan B2SA

Gerai pangan B2SA merupakan kegiatan mengoptimalkan peran Bumdes/koperasi/warung desa sebagai penyedia pangan B2SA sekaligus sebagai sarana promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA.

Fasilitasi yang diberikan berupa pengadaan sarana untuk mendisplay produk seperti rak display, lemari pendingin (freezer/showcase), plang nama gerai pangan B2SA, keranjang, brosur, roll banner, produk sebagai modal awal dan media promosi lainnya.

c. Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah serta pemberian makanan diutamakan kepada minimal 40 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak stunting, anak gizi buruk dan anak gizi kurang yang dikelola oleh kader PKK.

Kegiatan rumah pangan mencakup:

- Menyusun menu B2SA sesuai potensi dan kearifan lokal;
- Mengolah pangan B2SA;

- Membagikan makanan B2SA;
- Melakukan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada masyarakatdesa;
- Menyiapkan data awal penerima manfaat (BB/TB/LL dan kondisi fisik);
- Melakukan pemantauan perkembangan penerima manfaat (BB/TB/LL dan kondisifisik);
- Mendokumentasi setiap tahap kegiatan rumah pangan;
- Melaporkan kegiatan Desa B2SA setiap 1 bulan sekali;

Fasilitasi yang diberikan berupa pengadaan peralatan pengolahan pangan, materi promosi (banner, brosur, dan lain -lain), peralatan makan, plang nama Rumah Pangan B2SA serta pengadaan bahan pangan untuk diolah menjadi makanan B2SA.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, konsumsi pangan B2SA di Desa Raden dengan memanfaatkan pangan lokal, menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam pola konsumsi sehari-hari. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sejak dini melalui Pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (Desa B2SA). Melalui Pengembangan Desa B2SA di Desa Raden Kecamatan Kurau yang integrasi dan konvergensi dalam penyelenggaraan penganekaragaman konsumsi pangan, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan penyediaan, pengolahan, dan pemanfaatan pangan B2SA dalam pemenuhan pangan rumah tangga sehari-hari.

Kegiatan Pengembangan Rumah Pangan B2SA di Desa Raden memiliki tujuan yaitu mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang aktif, sehat dan produktif.

Sosialisasi Rumah Pangan B2SA Desa Raden Kecamatan Kurau

Untuk menggalakkan pola makan sehat dan beragam, PKK Desa Raden Kecamatan Kurau menggelar acara sosialisasi tentang pengembangan Rumah Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman). Acara yang dihadiri oleh warga Desa Raden Kecamatan Kurau ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan konsep pentingnya gizi seimbang dalam setiap menu keluarga.

Pembicara dalam acara ini adalah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan

dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, yang memberikan pengetahuan dan panduan praktis tentang bagaimana membangun Rumah Pangan B2SA yang sehat dan beragam. Hadir pula dalam acara ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa didampingi Ketua TP-PKK Desa Raden Kepala Seksi Pemerintahan dan anggota TP-PKK Desa Desa Raden Kecamatan Kurau, yang memberikan sambutan dan dukungan atas kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Beberapa bukti foto/ gambar kegiatan pengembangan desa B2SA di desa Raden Kecamatan Kurau seperti dibawah ini,



Tim dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang. Rumah Pangan B2SA bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kesehatan keluarga. Dengan memperkenalkan makanan bergizi sejak dini, kita dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh

Hasil dari intervensi kegiatan pengembangan desa B2SA di desa Raden terbukti sebagai upaya preventif dan represif yang mendukung upaya penurunan prevalensi stunting di desa Raden. Pelaku kegiatan dilakukan oleh kelompok/TP PKK Desa raden dengan sasaran penerimakegiatan adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak stunting, anak gizi buruk dan kurang, sasaran prevalensi stunting/masyarakat desa rentan rawan pangan, masyarakat luas dan lain-lain. Kegiatan pengembangan desa B2SA mampu meningkatkan kualitas konsumsi

pangan dan pola konsumsi sasaran ke arah penerapan makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)



J. GERAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)

Amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi Pangan dengan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Penganeekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Istilah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Pangan **beragam** artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. **Bergizi** artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. **Seimbang** artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-

masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. **Aman** artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui cara: (a) mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan; (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; (c) meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan (d) mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal. Promosi Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan berbagai metode melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun media luar ruang. Selain itu promosi dapat dilakukan melalui *direct communication* misalnya gerakan, kampanye, pameran, lomba menu B2Sa di Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, gencar mendorong konsumsi pangan sehat di kalangan pelajar khususnya di Sekolah Dasar (SD). Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dalam program "B2SA Goes to School Tahun 2024". Kegiatan ini diselenggarakan di SD Negeri Jorong 2 Kecamatan Jorong, SD Negeri Ujung di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati, SD Negeri Gunung Raja di Desa Gunungh Raja Kecamatan Tambang Ulang, dan SD Negeri 1 Bawah Layung di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau, SD Negeri Angsau 4 di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari dan SD Negeri Pelaihari 2 di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari.

DKPP Kabupaten Tanah Laut berharap, melalui sosialisasi ini, para siswa dapat memahami pentingnya mengonsumsi pangan B2SA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Upaya ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan cita-cita Generasi Emas 2045. Kegiatan Sosialisasi ini disambut antusias oleh pihak Kepala Sekolah, guru-guru, dan murid-murid SD. Pihak Kepala Sekolah, menyatakan rasa syukur atas terpilihnya sekolahnya sebagai lokasi kegiatan.



Lomba Cipta Menu B2SA Tingkatkan Kualitas Pangan Keluarga

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia demi kelangsungan hidup, aktif dan produktif. Ketersediaan bahan pangan dan kecukupan gizi bagi masyarakat sangat penting dilakukan agar terciptanya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kebutuhan dan konsumsi pangan merupakan hak asasi manusia yang dalam penyelenggaraannya wajib oleh negara. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan mengoptimalkan peran pangan lokal sebagai sumber pangan masyarakat

Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan B2SA, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mensosialisasikan dalam bentuk lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024, bertempat di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari.

Lomba cipta menu ini adalah memanfaatkan potensi lokal. Banyak sekali potensi makanan dari bahan makanan non beras yang bisa diolah menjadi makanan yang sehat dan berkualitas tentunya. Kita juga akan terus membiasakan membuat makanan bergizi khususnya untuk anak-anak kita sehingga mereka mendapatkan makanan yang tidak membosankan, menyenangkan, dan lebih bergizi. Karena tantangan kita untuk stunting ini tidaklah ringan, target di tahun 2024 angka stunting ini sebagaimana arahan Bapak Presiden harus di bawah 14 persen, sedangkan kita sekarang masih di angka 41% persen, (Data SSGI Tahun 2023) untuk itu berbagai effort harus dilakukan. Tujuan dari lomba ini yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Lamongan akan pentingnya konsumsi pangan B2SA, mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan atau menciptakan menu B2SA berbasis sumberdaya local, dan membangun budaya keluarga untuk mengkonsumsi menu makanan B2SA dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dengan memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar rumah. Berdasarkan penilaian oleh Tim Juri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Laut, yang menjadi Juara 1 diraih TP. PKK Kec. Tambang Ulang dengan nilai 875, Juara II diraih TP. PKK Kec. Bajuin dengan nilai 840, Juara III diraih TP. PKK Kec. Pelaihari dengan nilai 805, Juara Harapan I TP. Kec Jorong dengan nilai 780, Juara Harapan II TP. PKK

Kec. Bati Bati dengan Nilai 740, dan Juara Harapan III TP. PKK Kec Takisung dengan nilai 710.

Juri / Penilai Lomba terdiri dari: Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Laut, 1 orang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, 1 orang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel, 1 orang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut, 1 orang, Ahli Gizi, dari DPC PERSAGI Kab. Tanah Laut, 1 orang, dan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 1 orang



Melalui menu B2SA juga mendorong kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi berimbang pada saat menyajikan masakan makanan untuk keluarga, khususnya anak-anak kita. Terciptanya beraneka macam menu pangan lokal, yang tentunya bila dikelola dengan baik bisa menjadi sumber usaha yang dapat menambah pendapatan keluarga.

PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL (P3L)

Pola konsumsi masyarakat masih belum menunjukkan pola makan gizi seimbang dan beragam, yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat. Sebagian besar penduduk Indonesia (97%) mengkonsumsi sumber karbohidrat

dari beras. Daerah-daerah yang dulunya mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, seperti sagu, jagung dan umbi-umbian saat ini berubah mengkonsumsi beras. Konsumsi beras masyarakat Indonesia rata-rata 114,6 kg/tahun/kapita, atau 314 g per kapita per hari. Tingginya konsumsi beras dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan penyediaan beras semakin berat pada setiap tahunnya. Selain itu juga pola konsumsi yang tidak proporsional dapat menyebabkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan.

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Ke depan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Melalui kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melalui pengembangan usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal di

Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar, Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang, Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Desa Padang Luas Kec. Kurau dan Desa Asam Asam Kec. Jorong.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan olahan pangan berbasis pangan lokal kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan ibu-ibu peserta agar mampu mengolah sumber pangan lokal alternatif sehingga citra pangan lokal lebih meningkat dan mampu diterima di masyarakat. Sasaran pelatihan yaitu Kelompok TP-PKK Desa, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga dan Balita (BKB) dan Ibu-Ibu Balita. Berikut dibawah ini beberapa fotp/ gambar kegiatan pelatihan olahan pangan kudapan berbahan pangan lokal di Kabupaten Tanah Laut.



Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, juga melaksanakan Pelatihan Pengolahan Pangan Kudapan Berbahan Pangan Lokal Tingkat kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan TP-PKK Kabupaten Tanah Laut, yang dilaksanakan di Gedung Balairung Tuntung Pandang Kabupaten Tanah laut. Berikut di bawah ini Foto/ Gambar Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pangan Kudapan Berbasis Bahan Pangan Lokal Tahun 2024.





BIMTEK HACCP BAGI PELAKU UMKM OLAHAN PANGAN LOKAL

HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa *hazard* (bahaya) akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, tetapi pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (*preventive*) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen.

Pentingnya HACCP dalam suatu industri makanan tentu membuat karyawan di industri ini harus mempelajari lebih lanjut melalui training atau pelatihan HACCP. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam pengaplikasian HACCP dalam pekerjaan yang berhubungan dengan industri makanan. Bimbingan Teknis pun sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali, namun beberapa kali guna mengupdate informasi terbaru tentang keamanan pangan.

Dalam rangka mengaplikasikan HACCP dalam pekerjaan yang berhubungan dengan industri makanan. Bimtek inipun sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali, namun beberapa kali guna mengupdate informasi terbaru tentang keamanan pangan di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan industry olahan pangan rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Seksi Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan menyelenggarakan

Bimtek HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Angsau dengan Narasumber dari BPOM Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu nantinya dengan Sistem HACCP industri pangan yang mengikuti Bimtek akan mampu dan terampil untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya pada titik-titik tertentu selama proses produksi makanan dan proses penanganan makanan. Penerapan HACCP harus dilakukan oleh setiap segmen industri pangan untuk memastikan bahwa makanan yang akan dimakan oleh konsumen adalah makanan yang aman.

Bekerjasama antara DKPP Kabupaten Tanah Laut dan Balai POM Provinsi Kalimantan Selatan dan yang ditunjuk sebagai Narasumber :1).Ibu Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya); 2).Ibu Yuniar Ayu Handayani, S.Si, Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya); melaksanakan Bimtek dengan tema Bimtek HACCP Pengolahan Pangan Bagi Pelaku UMKM Pangan Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan perwakilan peserta Kecamatan Takisung 4 orang, Kecamatan Kurau 3 orang, Kecamatan Batu Ampar 4 orang. Kecamatan Tambang Ulang 4 orang, Kecamatan Jorong 4 orang, Kecamatan Panyipatan 4 orang, Kecamatan Bati-Bati 3 orang Kecamatan Kintap 3 orang, dan Kecamatan Pelaihari 15 orang. Total jumlah peserta Bimtek HACCP berjumlah : 44 orang. Foto / Gambar pelaksanaannya dapat dilihat di bawah ini.





Melalui Bimtek HACCP. Peserta Bimtek ini pun dapat menerapkan pada seluruh rantai produk makanan/ olahan pangan, mulai dari produksi primer sampai ke konsumen akhir. Selain meningkatkan jaminan keamanan pangan keuntungan lain dari HACCP adalah penggunaan sumber daya secara lebih baik dan pemecahan masalah dapat lebih cepat. Penerapan HACCP juga sesuai dengan implementasi sistem manajemen mutu, dan merupakan sistem terpilih dalam manajemen keamanan pangan.

Pelaksanaan kegiatan Bimtek HACCP ini dapat dikatakan relative berhasil baik dan sesuai dengan rencana. Keberhasilan Bimtek ini tidak semata-mata didasarkan pada hasil evaluasi pengetahuan yang dilakukan melalui tanya jawab dan praktek saja tetapi diharapkan juga keberlanjutan dari Bimtek. Karena jumlah peserta Bimtek terbatas hanya 44 orang maka sangat diharapkan peserta Bimtek mau dan mampu menularkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya, sehingga bisa berkembang secara luas, terutama bagi pelaku olahan pangan lain yang melakukan produksi olahan pangan yang terdapat di wilayah setempat.

PENYUSUNAN DOKUMEN DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN TANAH LAUT (RAD-PG)

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga Negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, pengaturan tentang pangan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan juga bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan diverminkan pada defenisi ketahanan pangan yaitu : “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”. Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

Pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan multisector, mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi sampai pada aspek pemanfaatan yang mempengaruhi status gizi. Pembangunan pangan dan gizi pada seluruh aspek tersebut memerlukan dukungan multisector diantaranya, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas DP2 KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (PUPR) Dinas DPR & KPLH dan Dinas Sosial, Dinas PMD, Bada Pusat Statistik (BPS).

Beberapa dampak buruk kurang gizi adalah: (1) Rendahnya produktivitas kerja; (2) Kehilangan kesempatan sekolah; (3) Kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi. Agar individu tidak kekurangan gizi maka akses setiap individu terhadap pangan harus dijamin. Akses pangan setiap individu ini sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara kontinyu. Kemampuan mengakses ini dipengaruhi oleh daya beli, yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Multisektor Tahun 2024 – 2027 ini merupakan dokumen yang berisi panduan dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan pangan dan gizi bagi institusi pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan dan desa, serta akan dijadikan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara.

RAD-PG Kabupaten Tanah Laut bertujuan untuk :

- a. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi di Kabupaten Tanah Laut melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
- b. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sehingga terjaga keterpaduan mulai dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Tanah Laut;
- c. Sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor;
- d. Sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi; dan
- e. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen Pemangku Kepentingan Pangan dan Gizi untuk mencapai Kedaulatan Pangan serta Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Tanah Laut;
- f. Menetapkan pilihan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan;
- g. Meningkatkan kemampuan dalam menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2027 diharapkan dijadikan sebagai acuan mewujudkan tujuan memperkuat Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Tanah Laut RAD-PG ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan menganalisa perkembangan situasi dan perencanaan program/kegiatan pangan dan gizi di Kabupaten Jombang sehingga mampu menerapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan local dan mampu membangun dan memfungsikan kelembagaan pangan dan gizi secara optimal serta mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi secara baik dan efektif. Berikut ini Foto / Gambar beberapa kegiatan RAD-PG.



aten
pan
hun

2022) dan 89,7 (Tahun 2023) menjadi 88,5 pada Tahun 2024 (dengan AKE 2100 Kalori/kapita/hari).

Dilihat dari komposisi Angka Kecukupan Energi, Konsumsi Dalam RPJMN 2020 - 2024, angka perkembangan Konsumsi Energi terus mengalami kenaikan, hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam program prioritas peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan. Ada beberapa alternatif yang mungkin menyebabkan skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Tanah Laut masih belum sesuai dengan skor ideal yang diharapkan, hal tersebut disebabkan kemungkinan antara lain kurang beragamnya pola konsumsi pangan keluarga, demikian juga tingkat inflasi yang tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan hal ini sangat berimbas kepada pola konsumsi pangan, faktor lainnya adalah tingkat pendidikan, dan pantangan makanan. Selain hal tersebut upaya untuk mencapai target skor PPH, Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan melakukan antara lain:

- 1) Pengembangan Desa B2SA di setiap kecamatan secara bertahap.
- 2) Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan kinerja pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan dibidang mutu dan keamanan pangan.
- 3) Dukungan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan berimbang, dan pangan rawan beragam, bergizi, Berimbang dan aman (B2SA).
- 4) Dukungan Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman gizi berimbang dan keamanannya.
- 5) Dukungan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan untuk mengetahui ketersediaan dan ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu

Dukungan ketersediaan informasi distribusi, harga, dan akses pangan di daerah merupakan salah satu indikator yang bisa menjelaskan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi distribusi, dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam, bergizi dan berimbang didaerah.

Adapun dukungan kegiatan antara lain :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
1	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per tahun	20.720.000,-	99,07	100
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	261.742.358,-	89,22	100
		Koordinasi dan sinkronisasi pemnatauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	56.550.355,-	94,83	100
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar	97.008.676,-	95,45	100
		Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu pangan segar asal tumbuhan Kab/Kota	77.114.989,-	90,98	100

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria memuaskan (memenuhi *range* 90 – 100 %). Alokasi APBD tahun 2024 untuk kegiatan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran daerah) adalah sebesar Rp. 268.779.525.000,- terealisasi sebesar,- Rp. 260.740.119.194,- atau (97,01% terhadap pagu).

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya perubahan, revisi anggaran, efisiensi kegiatan dan lain-lain.

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Bidang Konsumsi dan Keamanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Tahun 2024, Bidang Konsumsi dan Keamanan didukung oleh 5 (lima) orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA ada 1 orang, Strata Satu 2 (dua) orang Strata dua 2 orang, dengan status kepegawaian 3 (tiga) orang ASN dan 2 (dua) orang Tenaga PTT (Honorar).
2. Berdasarkan tingkat Kepangkatan: jumlah pegawai dengan golongan golongan III ada 1 (satu) orang dan golongan IV sebanyak 2 (dua) orang.

Dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, pada tahun 2024, Sesuai dengan kebijakan dan kewenangan oleh DKPP Kabupaten tanah Laut telah dilakukan upaya-upaya peningkatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualitas aparatur.

Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 97,03%%. Sumber daya manusia/Pegawai pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 5 orang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang Non PNS. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja SDM pada

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sangat memuaskan, dan agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya.

Sasaran strategis eselon III : meningkatnya pengawasan keamanan pangan.

Capaian kinerja terhadap target 2024 pengawasan keamanan pangan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2024		
			2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	Nilai	89,7	88,8	90	88,8	98,6%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA							98,6%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	90%	89,7%	90%	88,8%

Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar merupakan salah satu prioritas kegiatan Nasional "Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional" yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Capaian kinerja prioritas nasional dinilai berdasarkan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dengan satuan persentase (%) dan jumlah registrasi/sertifikasi/surveilan yang dilaksanakan.

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan adalah sebesar 90% pada Tahun 2024.

Penilaian capaian kinerja prioritas nasional untuk indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Tanah Laut dihitung berdasarkan capaian kegiatan sebagai berikut :

A. Pengawasan di Peredaran (60%)

Data yang dibutuhkan untuk perhitungan capaian kinerja pengawasan di peredaran adalah :

1. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N);
2. Hasil pengawasan dalam bentuk jumlah jumlah contoh/sampel yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (P);
3. Target Nasional Tahun berjalan untuk indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (T).

Cara perhitungan capaian kinerja pengawasan di peredaran adalah sebagai berikut:

Realisasi PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan di peredaran (Y) :

$$(Y) = P/N \times 100\%$$

Capaian Tertimbang kinerja pengawasan di peredaran (K1) :

$$(K1) = 60\% \times Y$$

Untuk Kabupaten Tanah Laut Realisasi PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan di peredaran adalah :

$$(Y) = P/N \times 100\%$$

$$= 176/176 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Tertimbang kinerja pengawasan di peredaran (K1) :

$$(K1) = 60\% \times Y$$

$$= 60\% \times 100\%$$

$$= 60\%$$

B. Registrasi dan sertifikasi (40%)

Capaian kinerja registrasi dan sertifikasi untuk Provinsi merupakan penjumlahan dari output penerbitan izin edar, sertifikasi (SPPB PSAT, HC, Registrasi Rumah Kemas dan Prima).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah penerbitan nomor registrasi label putih, nomor registrasi label hijau dan surat Keterangan Higienis Sanitasi.

Capaian kinerja provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan jumlah sertifikat dan registrasi per tahun sesuai tabel berikut :

Tabel Capaian Kabupaten/Kota

Jumlah Registrasi/Tahun (n)	Capaian (X)
>15	100%
11 - ≤ 15	75%
6 - ≤ 10	50%
1 - ≤ 5	25%
0	0%

Cara perhitungan capaian kinerja registrasi dan sertifikasi yaitu :

Capaian tertimbang kinerja registrasi dan sertifikasi (K2) :

$$(K2) = 40\% \times (X)$$

Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 telah menerbitkan 6 nomor registrasi label putih, berdasarkan Tabel Capaian Kabupaten /Kota nilai (X) Kabupaten Tanah Laut adalah 50%. Maka Capaian tertimbang registrasi dan sertifikasi Kabupaten Tanah Laut adalah :

$$(K2) = 40\% \times (X)$$

$$= 40\% \times 50\%$$

$$= 20\%$$

Capaian Kinerja Total (L) :

(L) = Capaian tertimbang kinerja pengawasan di peredaran (K1) + Capaian

Tertimbang kinerja registrasi dan sertifikasi (K2)

Maka Capaian Kinerja Total Kabupaten Tanah Laut adalah :

$$L = K1 + K2$$

$$= 60\% + 20\%$$

$$= 80\%$$

- C. Capaian kinerja total untuk indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Merupakan persentase capaian kinerja total terhadap target RPJMN untuk indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan pada tahun berjalan.

Cara perhitungan indicator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan adalah :

Capaian kinerja total untuk indicator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Q) :

$$(Q) = \text{Capaian kinerja total (L)} / \text{Target RPJMN (T)} \times 100\%$$

Target RPJMN untuk indicator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Tahun 2024 adalah 90%.

Perhitungan Capaian kinerja total untuk indicator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Tanah Laut adalah :

$$(Q) = \text{Capaian kinerja total (L)} / \text{Target RPJMN (T)} \times 100\%$$

$$= 80\% / 90\% \times 100\%$$

$$= 88,8\%$$









6. Eselon III (Kabid Pengembangan Usaha Perikanan)

Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.

Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Air Tawar dan Air Payau)

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Air Tawar dan Air Payau)	357,14	372,17	372,17	517,64
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Air Payau)	1066,38	1093,04	1093,04	2069,72
	Total Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (Air Tawar dan Air Payau)	1423,14	1465,21	1465,21	2587,36

Indikator Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budidaya air tawar mengalami kenaikan produksi baik itu Produksi Budidaya ikan air tawar dan budidaya ikan air payau. Target Produksi Budidaya Air Tawar Tahun 2024 adalah 372,17 Ton, jumlah produksi perikanan budidaya air tawar mencapai 517,64 ton, diperoleh dari produksi kolam, keramba dan jaring apung.

Peningkatan produksi budidaya air tawar tahun 2024 terutama komoditas ikan lele, nila dan patin dikarenakan meningkatnya budidaya ikan lele kolam terpal, dan ikan nila di kolam tanah dan jaring apung serta budidaya ikan patin di kolam tanah.

Kegiatan pembenihan di kabupaten tanah laut baru terdata 2 UPR. Kegiatan pembenihan berada di kecamatan Tambang Ulang dan Bati-Bati dengan komoditasnya adalah ikan lele.

Tabel Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Tahun	Perikanan Budiaya Air TAwar (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2020	331,93	6,28	1,93
2021	341,31	9,38	0,97
2022	357.14	15.83	1.04
2023	372.17	15.03	1,04
2024	517.64	145.47	10,33

Adapun kendala perikanan budidaya air tawar yang ada adalah sebagai berikut;

No.	KENDALA	SOLUSI
1	Permodalan	Kemitraan dan perbankan
2	Pemasaran	membentuk koperasi, kemitraan, promosi
3	penguasaan teknik budidaya	kepesertaan pelatihan/diklat teknis,
		pembinaan dan kunjungan dari instansi terkait dan penyuluh
		uji kompetensi pembudidaya
4	pakan	harga pakan yang cenderung mahal bisa diatasi dengan membuat pakan sendiri dengan bahan/alat yang ada di sekitar/lingkungan.
		Menggunakan pakan alternatif/tambahan

5	bibit unggul	disarankan untuk membeli bibit ikan yang bersertifikasi
6	pokdakan belum berbadan hukum	disarankan kepada kelompok membuat badan hukum agar bisa mengakses bantuan baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah
		fasilitasi kelompok untuk membuat dokumen berbadan hukum baik dari pemerintah daerah atau dari pihak swasta/perusahaan di sekitar
		swadaya kelompok
7	database/listing RTP perikanan budidaya	kegiatan pembuatan database RTP Perikanan budidaya di fasilitasi oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2019.
		Tersusunnya up dating data RTP dan Produksi Budidaya Perikanan kabupaten tanah laut yang lebih signifikan
8	peningkatan mutu dan kualitas produksi perikanan budidaya	pendampingan dan audit CBIB untuk kegiatan pembesaran dan CPIB untuk kegiatan pembenihan

Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau pada tahun 2024 adalah sebesar 1,02 % yang berada pada angka 2.069,72 ton dibanding pada tahun 2023 yang hanya berada pada angka 1093,04 ton dengan komoditas budidaya berupa udang windu, bandeng dll. Peningkatan produksi pada budidaya air payau pada tahun 2024 di banding tahun 2023 karena adanya peningkatan kegiatan di sektor perikanan budidaya air payau. Produksi tambak di kabupaten tanah laut berpotensi meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tambak dan rehab infrastruktur tambak.

Tabel produksi perikanan budidaya air payau

Tahun	Perikanan Budidaya Air Payau (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2020	1020,22	15,89	1,58
2021	1045,47	25,25	0,97
2022	1066.38	20.91	1.02
2023	1093.04	26.66	1.025
2024	2069.72	976.68	2.72

Keluaran kegiatan dalam rangka mendukung capaian program

No.	Keluaran	Awal	Perubahan I (Rasionalisasi)	Perubahan II
1	Bimbingan teknis pembudidaya ikan	✓	x	x
2	Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dan Benar	✓	x	x
3	Fasilitasi Kemitraan	✓	x	x
4	Updating data produksi perikanan budidaya	✓	✓	✓
5	Pembinaan dan pengembangan desa produksi perikanan budidaya	✓	x	x
6	Pengadaan alat uji kualitas air	x	x	✓
7	Fasilitasi pemeriksaan sampel penyakit ikan	x	x	✓
8	Buku saku pembudidaya ikan	x	x	✓

Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan

Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Olahan hasil Perikanan tahun 2024 realisasi sebesar 2.363 ton dari target produksi olahan hasil perikanan sebesar 1977 Ton, persentasi tersebut diatas target produksi sebesar 1.5 % dan hasil perolehan tahun 2024 sebesar 16,33 %, jadi naik sebesar 14,83 % dari target produksi olahan sebesar 1.5 %.

Hasil tersebut didapat dari meningkatnya olahan ikan kering, kerupuk, amplang, undang rebon (Papai), terasi dan undang beku serta olahan lainnya.

Nama produksi	Target	Perolehan	Persentase
Produksi olahan hasil perikanan	1977 ton	2320 ton	16,33 %

Tabel Produksi Olahan Perikanan

Tahun	Produksi Olahan Perikanan (Ton)	Kenaikan (Ton)	%

1	2	3	4
2020	1647	287	21,11
2021	1757	110	0,94
2022	1867	378	20,24
2023	1977	343	17,34
2024	2363	386	16,33

Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan tersebut antara lain ;

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kinerja (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	59.996.954,00	100	58.119.188,00	96,87
Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pengadaan pendidikan dan pelatihan	179.729.596,00	100	166.153.050,00	92,45
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.204.622.269,00	100	1.013.542.630,00	84,14
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	167.077.197,00	100	144.691.000,00	86,60

7. Eselon III (Kabid Perikanan Tangkap)

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023			2024		Capaian (%)
		Target (Ton)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap.	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (Perairan Laut)	61.155	61.790	1,10	62.072	62.243	0.28
	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (Perairan Umum)	4.852	4.361	-10,11	4.925	4.783	-2.88
Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		66.007	66.151	0,21	66.997	67.026	0,04

Indikator Kinerja Utama jumlah produksi perikanan tangkap untuk Perairan Laut dari Target produksi tahun 2024 sebesar 62.072 Ton atau bila di persentasekan targetnya 1,5 %, kemudian Di Tahun 2024 ada peningkatan Realisasi sebesar 62.243 Ton jadi ada peningkatan sebesar 171 Ton atau 0,28 %. Kemudian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan umum. target produksi tahun 2024 sebesar 4.925 ton, terealisasi sebesar 4.783 ton, sehingga adanya penurunan produksi perikanan umum sebesar 491 Ton (-2,88 %). Tidak tercapainya produksi perikanan umum sesuai target dikarenakan tahun 2024 terdampak kondisi musim yang tidak menentu, didalam target peningkatan kinerja persentase produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar 1,5 %.

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut

Tahun	Perikanan Tangkap perairan laut (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	52.824		
2018	53.324	500	0,94
2019	55.641	2317	4,35
2020	56.886	1245	2,24
2021	59964	3078	5,13
2022	60.251	2.125	3,65
2023	61.790	635	1,01
2024	62.243	171	0,28

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan umum. target produksi tahun 2024 sebesar 4.925 ton, terealisasi sebesar 4.783 ton, sehingga adanya penurunan dari target produksi perikanan umum sebesar 142 Ton (-2.88 %). Tidak tercapainya produksi perikanan umum sesuai target dikarenakan tahun 2024 terdampak kemarau panjang, didalam target peningkatan kinerja persentase produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar 1,5 %,

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum

Tahun	Perikanan Tangkap Perairan umum (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	3964		
2018	3977	13	0,33
2019	4333	356	8,95
2020	4339,1	6,1	0,14
2021	4581,1	242	5,28
2023	4780	84,5	1,79
2023	4852	-491	-10,11
2024	4925	-142	-2,88

Faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap yaitu:

1. Faktor cuaca ekstrim dan adanya fenomena elnino yang melanda daerah Kalimantan Selatan
2. Faktor sulitnya mendapatkan BBM nelayan bersubsidi
3. Sarana dan Prasana, khususnya alat tangkap yang tidak layak

4. Belum adanya Dokumen Kapal dan Dokumen perijinan Kapal Perikanan.
5. Keberadaan SDM penyuluh yang tidak merata pada kecamatan Pesisir
6. Kualitas SDM nelayan yang masih bersifat Tradisional, masih orientasinya untuk kebutuhan rumah tangga
7. Faktor Elegal fishing yang merusak ekosistem Sumberdaya Perikanan
8. Kurangnya informasi akses permodalan dari perbankan

Adapun dukungan kegiatan tahun anggaran 2024 antara lain

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	121.207.862	97.04 %	100%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	675.134.382	82.44 %	100%
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan Nelayan kecil	44.522.803	79.70 %	100%
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, bantuan	24.318.786	98.29 %	100%

		pembiayaan, kemitraan usaha			
	Pengelolaan penangkapan ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan	93.255.174	86.79 %	100%
		Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	547.470.143	94.85 %	100%

pada tahun 2024 sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap telah tercapai melebihi target yaitu 0,04% dari Target yang ditetapkan sebesar 1,5 %, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang terdiri dari 2 Program, 3 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, secara evaluasi Capaian Realisasi semua kinerja 100 %

Adapun dukungan kegiatan tahun anggaran 2024 antara lain Untuk mewujudkan Peningkatan Produksi peningkatan Tangkap ada langkah langkah strategis berupa intervensi Program Kegiatan Tahun 2024, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yaitu :

Untuk mewujudkan Peningkatan Produksi peningkatan Tangkap ada langkah langkah strategis berupa intervensi Program Kegiatan Tahun 2024, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dengan beberapa Sub Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 121.207.862,- realisasi

keuangan sebesar 97.04 %, dan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun catatan yang harus ditambahkan pada kegiatan tahun berikutnya yaitu koordinasi dengan aparat desa lebih diintensifkan lagi.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan anggaran sebesar Rp. 675.134.382,- Persentase Realisasi Keuangan 82.44 %, Capaian Realisasi Kinerja 100 %.
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan Nelayan kecil, dengan anggaran sebesar Rp. 44.522.803,- Persentase Realisasi Keuangan 79.70 %, Capaian Realisasi Kinerja 100 %.
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, dengan anggaran sebesar Rp. 24.318.786,- Persentase Realisasi Keuangan 98.29 %, Capaian Realisasi Kinerja 100 %.
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan, dengan anggaran sebesar Rp. 93.255.174,- Capaian Realisasi Keuangan 86.79%, Capaian Reaisasi Kinerja 100%, Output yang dilaksanakan penyediaan data sumber daya ikan 100% (1 Dokumen).
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap, dengan anggaran sebesar Rp. 547.470.143,- Capaian Realisasi Keuangan 94.85%, Capaian Reaisasi Kinerja 100%, Output yang dilaksanakan Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap 100% (325 unit).

Analisis efisiensi penggunaan SDM

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Karena seluruh target kinerja pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 100%. Sumber daya manusia/Pegawai pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 7 orang terdiri dari 4 orang PNS, 1 PPPK dan 2 orang Non PNS (PTT).

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

1. Kendala :

- 1) Banyaknya beban tugas diluar tupoksi utama yang menyebabkan pekerjaan menjadi terlambat.
- 2) Aparatur dalam bekerja masih normatif belum memiliki ide/gagasan untuk kemajuan nelayan
- 3) Jumlah SDM yang terbatas dirasa kurang bila dibandingkan dengan beban kerja luarbiasa banyak.
4. Masih belum layak ruang kerja dan tidak ada pendingin ruang kerja.
5. Peralatan kerja yang belum optimal sehingga salah satu memperlambat kinerja.

2. Solusi :

- 1) Perlu adanya pembagian tugas yang jelas terkait tugas diluar tupoksi utama;
- 2) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait peningkatan Kompetensi.
- 3) Perlu adanya SDM yang sesuai dengan TUPOKSI
- 4) Perlu adanya anggaran untuk ruangan representative/layak
- 5) Perlu pembelian peralatan AC, PC, Laptop untuk menunjang Kinerja

3. Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi dan Konsultasi terkait tugas-tugas diluar tupoksi utama;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

- 3) Usulan tambahan Personel ke BKD dengan melampirkan ANJAB, dan peta jabatan untuk memperkuat data.
- 4) Agar kinerja tercapai perlu membuat Kerangka acuan Kerja di setiap kegiatan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Ringkasan realisasi APBD Tahun 2024

Jumlah belanja operasi ini dipergunakan untuk membiayai seluruh Program (9 Program), Kegiatan (19 Kegiatan) dan Sub Kegiatan (45 Sub Kegiatan) SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Realisasi Belanja pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 antara Lain :

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran 2023	Realisasi			Pagu Anggaran 2024	Realisasi		
			Keuangan		Kin		Keuangan		Kin
			Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,076,021,423	6,053,142,743	82.72	100	9.939.630.661	8.060.428.641	81.09	95.36
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,890,027	7,646,909	88.89	100	12.864.746	11.071.502	86,06	100
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,989,407	5,861,909	83.87	100	8.041.879	6.826.000	84,88	100
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,900,620	1,785,000	93.92	100	4.822.867	4.245.502	88,03	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,308,206,663	4,382,431,004	82.29	100	5.159.952.247	4.698.153.533	91,05	100
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,300,403,044	4,376,031,004	82.56	100	5.149.952.252	4.689.309.933	91,06	100
	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,803,619	6,400,000	82.01	100	9.999.995	8.843.600	88,44	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	620.007.750	585.400.000	94,42	97,5
	5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					20.007.750	15.400.000	76,97	100
	6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					600.000.000	570.000.000	95,00	95
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,048,099,517	1,017,682,441	90.82	100	1,048,099,517	1.471.919.228	94,15	100
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,177,100	3,777,000	90.42	100	14.856.986	10.545.043	70,98	100
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	605,620,826	579,499,150	95.69	100	443.228.709	416.779.556	94,03	100
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,517,498	2,845,029	80.88	100	8.948.847	7.697.090	86,01	100

	10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,473,405	7,125,000	75.21	100	13.456.311	7.814.000	58,07	100
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	100	100	2,400,000	2,400,000	100	100
	12	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	9,360,000	93.60	100	16,100,000	15,000,000	93,17	100
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412,310,688	412,076,262	99.94	100	969.961.000	922.925.441	95,15	100
	14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	2.967.375	2.596.000	87,48	100
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	1.979.904.974	745.819.725	37,67	70
	15	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	242.290.800	218.280.000	90,09	100
	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	1.737.614.174	527.539.725	30,36	40
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491,665,716	437,285,054	65.78	100	510.621.716	476.211.682	93,26	100
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000	24,332,342	32.44	100	70.700.000	39.045.734	55,23	100
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416,665,716	412,952,712	99.11	100	439.921.716	437.165.948	99,37	100
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219,159,500	208,097,335	85.85	100	184.360.000	158.015.069	85,71	100
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,410,000	30,950,000	89.94	100	38,000,000	37.098.300	97,63	100
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77,000,000	73,904,400	95.98	100	126.380.000	111.846.769	88,50	100
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,849,500	4,610,000	58.73	100	19.980.000	9.070.000	45,40	100
		Rehab Gedung Kantor	99,900,000	98,632,935	98.73	100	0	0	0	0
2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	218,563,570	212,572,120	97.26	100	770.873.271	684.642.828	88,81	100
8		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	218,563,570	212,572,120	97.26	100	770.873.271	684.642.828	88,81	100
	22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	218,563,570	212,572,120	97.26	100	36.746.000	31.615.000	86,04	100
	23	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	290.305.866	237.314.828	81,75	100
	24	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0	0	0	0	443.821.405	415.713.000	93,67	100

3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	650,015,007	552,064,815	82.04	100	1.414.187.612	974.942.274	68,94	100
9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	69,287,500	59,685,000	86.81	100	412.118.099	123.660.000	30,01	100
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	66,437,500	57,190,000	86.08	100	386.322.339	102.825.000	26,62	100
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	2,850,000	2,495,000	87.54	100	0	0	0	0
26	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	0	0	0	0	25.795.760	20.835.000	80,77	100
10	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	161,902,237	112,842,665	69.44	100	663.056.200	543.612.380	81,99	100
27	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	81,655,000	81,375,000	99.66	100	604.773.000	502.632.150	83,11	100
28	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80,247,237	31,467,665	39.21	100	58.283.200	40.980.230	70,31	100
11	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	418,825,270	379,537,150	89.86	100	339.0134.313	307.669.894	90,75	100
29	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	16,424,330	14,479,500	88.16	100	20.720.600	20.527.000	99,07	100
30	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	200,841,293	179,903,750	89.58	100	261.742.358	233.516.534	89,22	100
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	201,559,647	185,153,900	91.86	100	56.550.355	53.626.360	94,83	100
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	68,920,000	33,685,000	48.88	100	221.114.978	154.087.280	69,69	100
12	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	68,920,000	33,685,000	48.88	100	221.114.978	154.087.280	69,69	100
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	68,920,000	33,685,000	48.88	100	221.114.978	154.087.280	69,69	100
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	125,844,535	106,654,429	85.98	100	174.123.665	165.612.059	95,11	100
13	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	125,844,535	106,654,429	85.98	100	174.123.665	165.612.059	95,11	100
33	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	58,210,489	52,735,390	90.59	100	97.008.676	95.450.501	98.39	100

		Registasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2,071,580	1,820,450	87.88	100	0	0	0	0
	34	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	65,562,466	52,098,589	79.46	100	77.114.989	70.161.558	90,98	100
6		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	544,625,562	451,836,506	82.10	100	1.384.701.288	1.216.234.572	87,83	100
14		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	18,914,982	15,353,640	81.17	100	640.725.317	600.233.870	93,68	100
	35	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	18,914,982	15,353,640	81.17	100	93.255.174	80.933.533	86,79	100
	36	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0	0	0	547.470.143	519.300.337	94,85	100
15		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	525,710,580	436,482,866	83.03	100	743.975.971	616.000.702	82,80	100
	37	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	525,710,580	436,482,866	83.03	100	675.134.382	556.612.022	82,44	100
	38	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0	0	0	0	44.522.803	35.485.940	79,70	100
	39	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0	0	0	0	24.318.786	23.902.740	98,29	100
7		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	289,185,817	270,178,574	89.93	100	1.469.343.819	1.262.449.868	85,92	100
16		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	54,545,350	43,084,774	78.99	100	239.726.550	224.272.238	93,55	100
	40	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	54,545,350	43,084,774	78.99	100	59.996.954	58.119.188	96,87	100
	41	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	179.729.596	166.153.050	92,45	100
17		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	193,315,467	188,553,800	97.54	100	1.229.617.269	1.038.177.630	84,43	100
	42	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	193,315,467	188,553,800	97.54	100	1.204.622.269	1.013.542.630	97,54	100
	43	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0	0	0	0	24.995.000	24.635.000	98,56	100
8		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	64,909,388	51,945,000	80.03	100	121.207.862	117.620.500	97,04	100

18	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	64,909,388	51,945,000	80.03	100	121.207.862	117.620.500	97,04	100
44	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	64,909,388	51,945,000	80.03	100	121.207.862	117.620.500	97,04	100
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	115,414,805	98,221,900	85.10	100	115,414,805	144.691.000	86,60	100
19	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	115,414,805	98,221,900	85.10	100	167.077.197	144.691.000	86,60	100
45	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	115,414,805	98,221,900	85.10	100	167.077.197	144.691.000	86,60	100
JUMLAH		12.530.421.310	11.048.226.541	88,17	88,57	15.662.260.353	12.780.709.022	81.60	96,15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mengelola anggaran sebesar Rp. 15.662.260.353,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.780.709.022,- atau sekitar 81,60%. Dengan menggunakan skala penilaian sebagaimana telah dicantumkan diatas dapat dikatakan bahwa capaian realisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bernilai TINGGI. Besaran capaian diatas banyak terpengaruh oleh selisih pada nilai HPS, Pajak, besaran pada standar harga yang ada pada sistem penganggaran, dan belanja tak terduga terkait pengendalian inflasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan angka inflasi Kabupaten Tanah Laut dibawah Nasional, serta ada beberapa paket pekerjaan fisik sarana prasarana pendukung terkait pembangunan gedung kantor baru yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pekerjaan bangunan utama yang baru selesai diakhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun kelima terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024–2026, maka perhitungan LKJIP dilakukan dengan menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), formulir Penetapan Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dimana didalam penyusunan LKJIP dengan sistem ini cara pengukuran kinerja diarahkan untuk mengukur kegiatan-kegiatan dalam pencapaian sasaran yang terkait pengukuran kinerja. Ada beberapa hal yang perlu disikapi terhadap pencapaian target kinerja indikator dalam pencapaian strategis diantaranya adalah :

Secara global hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis capaian kinerja maka pada tahun 2024 ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 81,60%. Hasil ini sebagian belum mencapai target sasaran yang maksimal pada tahun bersangkutan yang telah ditetapkan pada DPA, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan pemikiran, solusi dan peningkatan serta perbaikan atas sajian Lapkin tersebut dimasa yang akan datang.

Adapun hasil (out-come) kegiatan tahun anggaran 2024, sesuai sasaran target yang yang tertuang Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu adanya kesimpulan analisa atas capaian kinerja tersebut dalam batasan target yang kan dicapai oleh SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersebut dengan memperhatikan hal hal atau faktor-faktor kendala yang harus dicermati diantaranya adalah :

1. Kesesuaian Renstra tahun 2024 – 2024 yang di breakdown dari tahun ketahun, untuk target terhadap capaian kinerja perlu dievaluasi terhadap besaran kapasitas baik berupa angka-angka ataupun ukuran, volume, produk harus dilakukan pencermatan kembali.

2. Ukuran secara produksi hasil perikanan secara umum sesuai hasil IKU yang telah ditampilkan pada Bab III tersebut telah menunjukkan adanya penurunan produksi perikanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, iklim yang tidak kondusif, pluktuasi harga pasar yang tidak menentu, kondisi kapal yang sudah semakin tua, adanya regulasi yang masih membatasi hak-hak para nelayan dalam menangkap ikan termasuk alat tangkap yang dipergunakan.
3. Untuk kegiatan penunjang lainnya berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 telah berjalan secara optimal dengan persentase keuangan dan fisik cukup baik , hanya saja ada beberapa faktor kendala pula yang harus disikapi pada saat itu berupa adanya regulasi peraturan dari permendagri seperti hal tersebut diatas terkait keberadaan bantuan hibah pada masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Tanah Laut. Terbatas.


B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi peningkatan kinerja yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan rumusan dalam pencapaian target dan sasaran atas pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan memanfaatkan stakeholder yang terkait dalam meningkatkan komoditi sektor produksi perikanan dan pendapatan yang selaras.
2. Pemanfaatan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu adanya pencermatan dan azas manfaat serta tingkat kebutuhan riil yang benar-benar dapat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.
3. Selektifitas terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar konsisten untuk dilaksanakan dan penuh tanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.
4. Pencermatan terhadap skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi modal utama dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Demikian laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, sebagai bahan informasi gambaran kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian target indikator dan sasaran strategis.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19710224 199702 1 003

Lampiran ;

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertanda tangan
3. Cascading/Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Renstra (2024-2026)
5. Matrik Keselarasan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 900/ 08 /DKPP/2025

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;

MENINGAT :

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

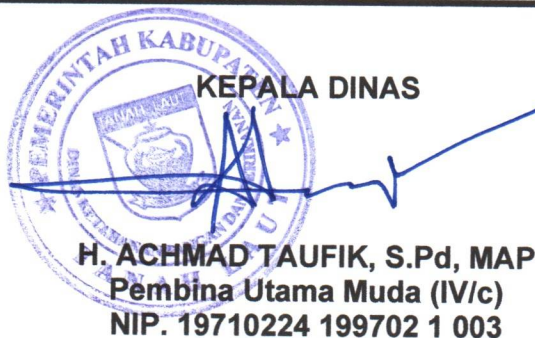
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	

KEPALA DINAS



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 900/ 08 /DKPP/2024
Tanggal : 10 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ketua
3	Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
4	Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
5	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
6	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
7	Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
8	Staf Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	



KEPALA DINAS

H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003